



AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH



PENULIS :

- Renika Hasibuan
- Erna Hendrawati
- Amelia Rizky Alamanda
- Rosanna Purba
- Aries Veronica
- Zainab
- Aprih Santoso
- Richad Alamsyah

ISBN 978-623-8004-42-3



9 786238 004423

AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH

**Renika Hasibuan
Erna Hendrawati
Amelia Rizky Alamanda
Rosanna Purba
Aries Veronica
Zainab
Aprih Santoso
Richad Alamsyah**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH

Penulis :

Renika Hasibuan
Erna Hendrawati
Amelia Rizky Alamanda
Rosanna Purba
Aries Veronica
Zainab
Aprih Santoso
Richad Alamsyah

ISBN : 978-623-8004-42-3

Editor : Mila Sari, S.ST, M.Si

Rantika Maida Sahara, S.Tr.Kes.

Penyunting : Aulia Syaharani, S.Tr.Kes.

Desain Sampul dan Tata Letak : Handri Maika Saputra, S.ST

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat

Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id

Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, September 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Buku Hasil Kolaborasi bertema “Akuntansi Keuangan Menengah” dengan tepat waktu.

Buku kolaborasi ini disusun atas kerjasama antar sesama penulis yang berasal dari berbagai latar belakang profesi dan lintas daerah di seluruh Indonesia. Selain itu, buku kolaborasi dapat menjadi wadah untuk menyatukan berbagai gagasan dan pemikiran dari seorang pakar atau ahli dari seluruh Indonesia dan menjadikan media silaturahmi akademik.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman penulis dan penerbit GetPress. Ucapan terima kasih juga disampaikan pada keluarga yang telah mendukung dan semua pihak yang terlibat dalam membantu menyelesaikan buku ini.

Penulis, September 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PELAPORAN KEUANGAN DAN STANDAR AKUNTANSI	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Laporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan	2
1.3 Akuntansi dan Alokasi Modal	7
1.4 Standar Akuntansi Keuangan	8
1.4.1 PSAK-EMKM (Entitas Mikro, Kecil dan Menengah)	11
1.4.2 PSAK-Syariah (Pernyataan Standar Akuntansi Syariah).....	11
1.4.3 SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)	12
BAB 2 LABA RUGI.....	14
2.1 Klasifikasi Akun Laporan Laba Rugi	14
2.1.1 Klasifikasi Pendapatan (Revenues)	14
2.1.2 Pendapatan Vs Penerimaan Kas	18
2.1.3 Pengertian Dan Klasifikasi Biaya.....	20
2.2 Harga Pokok Penjualan	26
2.3 Pengertian Laba Dan Bentuk Laporan Laba Rugi	28
2.3.1 Jenis Laporan Laba Rugi	30
2.4 Isu Dalam Pelaporan Laba Rugi	32
BAB 3 PIUTANG	35
3.1 Pengertian Piutang Usaha	35
3.2 Klasifikasi Piutang	35
3.3 Pencatatan, Pengukuran Dan Penyajian Piutang	36
3.4 Dasar Pencadangan Piutang Tak Tertagih	36
3.5 Penghapusan Piutang	39
BAB 4 PENILAIAN PERSEDIAAN	42
4.1 Pengertian Persediaan.....	42
4.2 Jenis Persediaan	42
4.3 Kepemilikan Persediaan.....	43
4.4 Metode Pencatatan Persediaan	45
4.5 Biaya Perolehan Persediaan.....	48
4.6 Harga Pokok Persediaan	49
4.7 Penilaian Persediaan	51
4.8 Metode Taksiran Persediaan	51
4.9 Kesalahan Pencatatan Persediaan.....	54

BAB 5 DEPRESIASI, PENURUNAN NILAI, DAN DEPLESI	56
5.1 Pendahuluan	56
5.2 Depresiasi.....	57
5.2.1 Pengertian	57
5.2.2 Faktor – faktor yang mempengaruhi penyusutan aset tetap	57
5.2.3 Metode Depresiasi	58
5.2.4 Perlakuan Akuntansi untuk Depresiasi	61
5.3 Penurunan Nilai.....	63
5.3.1 Pengertian	63
5.3.2 Pengukuran Penurunan Nilai	63
5.3.3 Metode Penurunan Nilai	63
5.4 Deplesi.....	64
5.4.1 Definisi Deplesi	64
5.4.2 Metode perhitungan Deplesi	65
BAB 6 ASET TIDAK BERWUJUD	68
6.1 Pendahuluan	68
6.2 Pengakuan Aset Tidak Berwujud	68
6.3 Penilaian Aset Tidak Berwujud	68
6.3.1 Merek.....	69
6.3.2 <i>Software</i>	69
6.3.3 Lisensi dan Waralaba	70
6.3.4 Paten	70
6.3.5 Hak Cipta (<i>Copyright</i>).....	70
6.3.6 Resep, Formula, Model, Desain dan Prototipe.....	71
6.3.7 Goodwill.....	71
6.3.8 Beban yang ditanggihkan.....	72
6.3.9 Biaya riset (penelitian) dan pengembangan	72
6.3.10 Biaya pendirian perusahaan	73
6.4 Pengelompokan Aset Tidak Berwujud	74
6.5 Pencatatan dan Pelaporan Aset Tidak Berwujud	74
BAB 7 INVESTASI.....	77
7.1 Pendahuluan	77
7.2 Investasi Dalam Sekuritas Hutang.....	78
7.3 Investasi Dalam Sekuritas Ekuitas.....	80
7.4 Penyajian	81
BAB 8 PENGAKUAN PENDAPATAN	84
8.1 Pendahuluan	84

8.2 Definisi Pendapatan	85
8.3 Ruang Lingkup Pendapatan Berdasarkan Standar Akuntansi	85
8.4 Pendapatan atas Penjualan Barang.....	86
8.5 Pendapatan atas Penjualan Jasa.....	88
8.6 Pendapatan atas Penggunaan Aset Oleh Pihak Ketiga.....	89
8.7 Pendapatan atas Kepemilikan Kontrak Jangka Panjang.....	90
8.8 Pengakuan Pendapatan Yang Spesifik	93
BIODATA PENULIS	

BAB 1

PELAPORAN KEUANGAN DAN STANDAR AKUNTANSI

Oleh Renika Hasibuan

1.1 Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi sekarang ini dimana dengan era perdagangan bebas, ada ketergantungan ekonomi nasional. Dalam rangka memperoleh pembiayaan, perusahaan tidak hanya mengakses pasar modal di negaranya tetapi juga di Negara lain. Dengan perkembangan dunia bisnis yang dinamis, begitu juga dengan dunia akuntansi sebagai bahasa bisnis turut berkembang. Hal ini membuat laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting karena laporan keuangan merupakan produk akhir akuntansi untuk pengambilan keputusan sehingga kualitas laporan keuangan menjadi tuntutan yang wajar. Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam periode tertentu.

Menurut Martani, Dwi.,dkk (2012) Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Akuntansi merangkum transaksi yang terjadi dari sebuah entitas, kemudian memproses dan menyajikannya dalam bentuk laporan yang diberikan kepada para pengguna laporan keuangan,

Akuntansi menurut *American Institute of certified Public Accounting (AICPA)* dalam Ahmed Riahi Balkaoui (2000), mendefenisikan akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil tersebut. Menurut Kieso, *et al.* (2021) karakteristik penting akuntansi adalah Identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi keuangan mengenai entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan.

Secara umum terdapat tiga aktivitas dalam akuntansi, yaitu sebagai berikut :

1. Aktivitas identifikasi transaksi (*identifying*). Dalam aktivitas ini dilakukan identifikasi terhadap transaksi yang terjadi dalam suatu entitas. Dalam proses ini akan dapat diklasifikasi apakah suatu transaksi merupakan transaksi merupakan transaksi ekonomi/keuangan atau non ekonomi.
2. Aktivitas pencatatan (*recording*). Dalam aktivitas ini semua transaksi ekonomi yang telah diidentifikasi pada tahap pertama akan dicatat secara kronologis dan sistematis dengan ukuran nilai moneter tertentu.
3. Aktivitas komunikasi (*communicating*). Dalam aktivitas ini akan dilakukan pelaporan dan distribusi terhadap informasi akuntansi berupa laporan keuangan kepada para pemakai laporan keuangan.

1.2 Laporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang disebut siklus akuntansi. Laporan keuangan menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan selama satu periode. Selain itu, laporan keuangan juga menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang ditunjukkan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.

Menurut Kieso, *et al.* (2021) mendefenisikan akuntansi keuangan (*financial accounting*) adalah proses yang memuncak dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk digunakan oleh pihak internal dan eksternal. Sebaliknya, akuntansi manajerial (*managerial accounting*) adalah proses mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, dan mengomunikasikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi operasi perusahaan.

Menurut Rudianto (2012) dilihat dari siapa pemakai atau pengguna laporan keuangan perusahaan, akuntansi dibagi menjadi dua yaitu :

1. Akuntansi keuangan adalah sistem akuntansi yang pemakai informasinya adalah pihak eksternal organisasi perusahaan,

seperti kreditor, pemerintah, pemegang saham, investor dan sebagainya.

2. Akuntansi Manajemen adalah sistem akuntansi yang memakai informasinya adalah pihak internal organisasi perusahaan seperti, manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan sebagainya. Akuntansi manajemen berguna sebagai alat bantu pengambilan keputusan.

Secara umum, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dan siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Tujuan laporan keuangan adalah untuk :

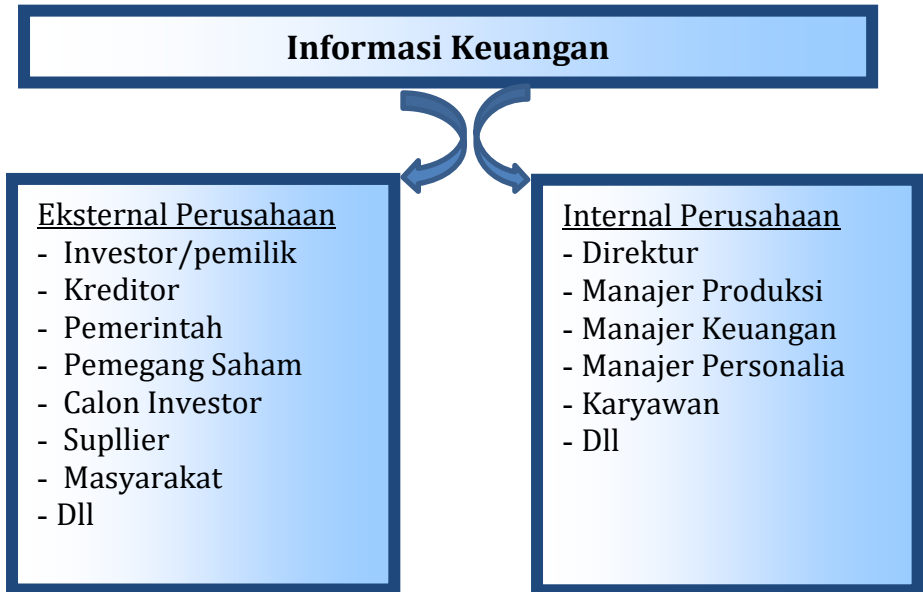
1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha demi memperoleh laba,
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan untuk mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba di masa depan.
4. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan keuangan ketika mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
5. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi tentang aktivitas pembiayaan dan investasi.
6. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

Kebutuhan terhadap informasi yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan tidak hanya muncul dari pihak eksternal perusahaan seperti kreditor, *supplier*, pemerintah atau calon

investor, tetapi juga muncul dari pihak organisasi. Pihak manajemen akan membutuhkan informasi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang dilakukan perusahaan, seperti jumlah beban bahan baku yang dikeluarkan, beban tenaga kerja selama suatu periode, beban *overhead* pada periode terkait, atau beban produksi dalam satu tahun.

Selain sebagai alat pertanggungjawaban, informasi keuangan diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Pengambilan keputusan ekonomi adalah keputusan yang dilakukan secara sadar untuk menetapkan sesuatu atas dasar data dalam bidang bisnis. Pengguna laporan keuangan atau pemakai informasi akuntansi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Pemakai Informasi Akuntansi



Pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan dan berhubungan dengan perusahaan adalah :

1. Kreditor, yaitu orang atau perusahaan yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan untuk berbagai keperluan usaha. Sebagai pihak yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan kreditor membutuhkan informasi untuk menjamin bahwa uang yang dipinjamkannya akan dibayar beserta bunganya. Karena itu, informasi yang diperlukan mencakup:

- a. Besarnya kekayaan perusahaan
 - b. Kemampuan menghasilkan laba usaha
 - c. Perbandingan utang dan total kekayaan perusahaan
2. Pemerintah, yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan usaha dan hal-hal yang terkait dengannya. Sebagai pihak yang memungut pajak penghasilan kepada perusahaan, informasi utama yang diperlukan pemerintah mencakup:
 - a. Laba usaha yang diperoleh
 - b. Beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan
3. Calon Investor, yaitu orang-orang atau lembaga yang akan menanamkan uangnya dalam suatu perusahaan dimasa mendatang. Sebagai pihak yang akan menanamkan uangnya dalam perusahaan, calon investor harus memiliki keyakinan bahwa perusahaan tersebut dapat memberikan pengembalian yang memadai dalam jangka panjang. Karena itu, informasi yang diperlukan investor mencakup:
 - a. Laba usaha yang diperoleh dalam beberapa tahun terakhir
 - b. Pertumbuhan kekayaan perusahaan
4. Pemasok (*supplier*) yaitu orang atau perusahaan yang menjual berbagai barang kepada perusahaan, mulai dari peralatan kantor, mesin, kendaraan hingga bahan baku usaha. Sebagai pihak penjual barang secara kredit kepada perusahaan, pemasok harus memiliki keyakinan bahwa kredit yang diberikannya kepada perusahaan akan dapat dibayar sesuai kesepakatan. Karena itu, informasi yang diperlukan mencakup :
 - a. Besarnya kekayaan perusahaan
 - b. Kemampuan menghasilkan laba usaha
 - c. Perbandingan utang dan total kekayaan perusahaan
5. Pemilik/pemegang saham yaitu orang atau lembaga yang telah menanamkan uang atau kekayaannya pada perusahaan. Sebagai pihak yang telah menanamkan uangnya dalam perusahaan, pemilik perusahaan harus memperoleh imbalan atas kekayaan yang telah ditanamkannya tersebut. Imbalan dapat berupa

pembagian atas sebagian atau seluruh laba usaha yang telah diperoleh perusahaan. Karena itu informasi utama yang diperlukan adalah :

- a. Laba usaha yang diperoleh
 - b. Perubahan kekayaan perusahaan dalam beberapa tahun
6. Manajer Produksi yaitu orang yang bertanggungjawab terhadap keseluruhan proses menghasilkan produk dalam suatu perusahaan. Sebagai pihak internal perusahaan yang bertanggungjawab terhadap proses produksi, manajer produksi memerlukan informasi tentang keseluruhan biaya maupun rincian biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produk perusahaan,
 7. Manajer Pemasaran, yaitu orang yang bertanggungjawab terhadap keseluruhan proses pemasaran produk perusahaan mulai dari promosi, distribusi hingga pelayanan purna jual. Sebagai pihak internal perusahaan yang bertanggungjawab atas pemasaran produk perusahaan, manajer pemasaran memerlukan data biaya produksi dari setiap produknya guna menentukan harga jual produk tersebut dan rincian biaya pemasaran untuk mencari alternatif biaya pemasaran yang paling efisien bagi perusahaan tanpa mengabaikan efektivitas pemasarannya.
 8. Berbagai pihak internal perusahaan lainnya yang memerlukan data dan informasi keuangan lain yang harus disediakan oleh akuntansi.

Laporan keuangan merupakan sarana utama untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak di luar perusahaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berikut penjelasannya :

1. Laporan Laba Rugi Komprehensif adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Secara umum laporan laba rugi terdiri dari unsur pendapatan dan unsur beban usaha.

2. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan hak residu atas asset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Secara umum laporan perubahan ekuitas milik perusahaan perseroan terbatas melibatkan unsur modal saham, laba usaha dan dividen. Modal saham dan laba ditahan pada awal periode ditambah dengan penambahan modal saham dan laba usaha periode tersebut dikurangi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham perusahaan akan menghasilkan ekuitas pada akhir periode.
3. Laporan Posisi Keuangan adalah daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh.
4. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan yang digunakan perusahaan selama satu periode akuntansi, beserta sumber-sumbernya. Secara umum semua aktivitas perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok aktivitas utama yang berkaitan dengan penyusunan laporan arus kas. Ketiga kelompok aktivitas tersebut yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
5. Catatan atas laporan keuangan adalah informasi tambahan yang harus diberikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu, yaitu kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan, dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut.

1.3 Akuntansi dan Alokasi Modal

Kebutuhan hidup dari pelaku ekonomi tidak terbatas, namun dengan sumber daya yang terbatas akan selalu berusaha memenuhi kebutuhannya dan berusaha untuk mengoptimalkan dan memastikan sumber daya digunakan secara efisien. Dalam hal ini investor dan kreditur sebagai pemilik dana atau sumber daya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan pengembalian dari hasil investasinya. Alokasi modal adalah cara mendistribusikan dan menginvestasikan sumber daya keuangan yang dimiliki perusahaan dengan meningkatkan efisiensinya, dan memaksimalkan keuntungannya.

Sebagai investor atau kreditur akan membutuhkan informasi keuangan perusahaan sehingga dapat memilih untuk investasi dengan tingkat pengembalian yang tinggi atau adanya peningkatan investasi dimasa mendatang. Untuk itu, akuntan harus menyajikan laporan keuangan secara lengkap, relevan dan reliabel sehingga keputusan yang diambil oleh investor atau kreditur bias tepat untuk mengalokasikan dananya pada entitas yang memberikan prospek yang baik di masa mendatang.

Dengan era globalisasi dan perkembangan bisnis dengan era perdagangan bebas maka untuk membuat globalisasi menjadi efisien, diperlukan standar yang sama dalam pelaporan keuangan sebagai informasi akuntansi bagi pengguna, dimana perusahaan tidak hanya mengakses pasar modal di Negara asalnya tetapi juga di pasar modal di Negara-negara lain. Selain itu, karena kemajuan teknologi dan persyaratan peraturan yang semakin ringan, investor dapat melakukan transaksi keuangan lintas batas nasional untuk berinvestasi, mengalokasikan modal, dan membuat keputusan pembiayaan yang melibatkan banyak perusahaan asing dan menginvestasikan lebih banyak dananya di pasar internasional. Akibatnya, terdapat peningkatan jumlah investor yang memiliki efek (sekuritas) perusahaan asing.

1.4 Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Dengan adanya standar akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Di dunia ada 2 standar yang dijadikan referensi yaitu *International Financial Reporting Standard* (IFRS) dan *US Generally Accepted Accounting Principles* (US-GAAP). IFRS disusun oleh *International Accounting Standard Board* (IASB) sedangkan US-GAAP disusun oleh *Financial Accounting Standar Board* (FASB).

Di Indonesia, Efektif per 1 Januari 2015 secara garis besar akan konvergen dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang berlaku efektif 1 Januari 2014. DSAK IAI

telah berhasil meminimalkan perbedaan antara kedua standar, dari tiga tahun di 1 Januari 2012 menjadi satu tahun di 1 Januari 2015. Ini merupakan suatu bentuk komitmen Indonesia melalui DSAK IAI dalam memainkan perannya selaku satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara. Dengan perbedaan yang semakin sedikit antara SAK dan IFRS maka diharapkan akan memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan di Indonesia. Perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, regulator yang berusaha menciptakan infrastruktur pengaturan yang dibutuhkan, khususnya dalam transaksi pasar modal, serta pengguna informasi laporan keuangan dapat menggunakan SAK sebagai suatu panduan dalam meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan.

Penyusunan dan pencabutan SAK wajib mengikuti *due process procedure* yang telah ditetapkan dalam Peraturan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia. Proses tersebut meliputi : identifikasi isu; konsultasi isu dengan Dewan Konsultatif SAK (DKSAK) (jika diperlukan); melakukan riset terbatas; pembahasan materi SAK; pengesahan dan publikasi *exposure draft*; pelaksanaan *public hearing*; pelaksanaan *limited hearing* (jika diperlukan); pembahasan masukan publik; dan pengesahan SAK. Sedangkan penyusunan buletin teknis dan *annual improvements* tidak wajib mengikuti keseluruhan tahapan *due process procedure*.

Dalam proses akuntansi, seorang akuntan harus menjalankannya sesuai standar yang berlaku. Di Indonesia, Standar akuntansi di Indonesia berkembang menjadi 5 pilar yang disusun dengan mengikuti perkembangan dunia usaha yaitu : PSAK-IFRS (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan-*International Financial Reporting Standard*), SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik), PSAK-EMKM (Entitas Mikro, Kecil dan Menengah), PSAK-Syariah (Pernyataan Standar Akuntansi Syariah), SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).

1. PSAK-IFRS (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan-*International Financial Reporting Standard*)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau *International Financial Reporting Standard* (PSAK) adalah nama lain dari SAK yang diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sejak tahun 2012 lalu sampai dengan tahun 2021. Standar ini wajib digunakan oleh badan

usaha yang memiliki akuntabilitas publik yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, ataupun perusahaan dana pensiun). Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan.

Penggunaan IFRS sendiri ditentukan karena Indonesia merupakan anggota IFAC (*Internatinal Federation of Accountants*) yang menjadikan IFRS sebagai standar mereka. Selama tahun 2020, DSAK IAI telah mengesahkan 1 (satu) PSAK, 1 (satu) ISAK, 6 (enam) judul Amendemen atas PSAK, 1 (satu) Penyesuaian Tahunan 2020, dan 2 (dua) standar lain yang statusnya masih berupa Draf Eksposur (yaitu, Draf Eksposur SAK Entitas Privat dan Draf Eksposur Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan).

Ciri - ciri entitas yang dianggap memiliki akuntabilitas publik yang signifikan yaitu :

- a. Entitas tersebut telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, kepada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan sekuritas (efek) di pasar modal.
- b. Entitas tersebut menguasai asset dalam kapasitas sebagai fidusia bagi sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.

2. SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik yaitu entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK-ETAP dikeluarkan tahun 2010. SAK-ETAP merupakan hasil penyederhanaan IFRS yang meliputi tidak adanya laporan laba rugi komprehensif, penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan. Tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar, serta tidak

ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak.

Ciri - ciri entitas yang tanpa akuntabilitas publik yaitu :

- a. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan.
- b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

Badan usaha yang tergolong sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik adalah :

- Entitas Perorangan
- Persekutuan Perdata
- Firma
- CV
- Perseroan Terbatas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan.
- Koperasi

1.4.1 PSAK-EMKM (Entitas Mikro, Kecil dan Menengah)

SAK-EMKM keluar pada tahun 2016. SAK-EMKM disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah yaitu entitas yang belum mampu memenuhi persyaratan sesuai SAK-ETAP. Entitas yang menggunakan PSAK-EMKM sebagai pedomannya memuat laporan keuangan secara eksplisit dan tetap harus patuh dalam pembuatannya

1.4.2 PSAK-Syariah (Pernyataan Standar Akuntansi Syariah)

PSAK-Syariah adalah standard yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah. PSAK-Syariah merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat, dan lain sebagainya. Bank syariah menggunakan dua standard dalam menyusun laporan keuangan. Sebagai entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, bank syariah menggunakan PSAK, sedangkan untuk transaksi syariahnya menggunakan PSAK syariah.

Pengembangan standar ini dibuat berdasarkan acuan dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Standar ini terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan

pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istishna.

1.4.3 SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. 2017. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Kieso, Donald.E., Jerry J. Weygandt., dan Terry D.Warfield. 2021. *Intermediate Accounting(IFRS edition)*. Jakarta. Salemba Empat.
- Martani, Dwi.,dkk. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudianto. 2012.Pengantar Akuntansi (Adaptasi IFRS). Jakarta:Erlangga.
- Stice, E.Kay. James D. Stice., dan Fred Skousen. 2011. *Intermediate Accounting* (edisi keenambelas). Jakarta : Salemba Empat.

BAB 2

LABA RUGI

Oleh Erna Hendrawati

2.1 Klasifikasi Akun Laporan Laba Rugi

2.1.1 Klasifikasi Pendapatan (Revenues)

Laporan laba rugi menunjukkan besarnya pendapatan dan biaya atau beban (Prihadi, 2017). Perbandingan pendapatan dan pengeluaran biaya akan menimbulkan adanya laba atau rugi. Perbedaan atau selisih antara akun pendapatan dan pengeluaran yang positif berarti perusahaan memperoleh keuntungan (laba) dan terdapat selisih kurang atau negatif maka perusahaan memperoleh rugi. Agar kita dapat menyajikan laporan laba rugi dengan baik, maka perlu pemahaman isi yang harus dilaporkan dalam laporan laba rugi. Mungkin kita bertanya pada teman atau saudara kita: berapa pendapatannya selama sebulan?. Jawaban akan beragam. Seorang pegawai kantor akan menghitung pendapatan adalah jumlah uang yang dibawa pulang selama sebulan. Seorang petani akan menghitung berapa hasil panen setahun kemudian dibagi 12 bulan. Seorang pedagang kios, akan menghitung berapa jumlah uang yang diterima dari hasil penjualan selama sebulan.

Persepsi mereka tentang pendapatan tidak salah. Dalam akuntansi pendapatan diukur pada saat transaksi penyerahan jasa atau barang terjadi. Contoh : jika kita seorang pegawai sebuah perusahaan, walaupun akhir bulan belum menerima gaji baik berupa uang maupun natura, boleh mengakui pendapatan bulan tersebut karena telah menyerahkan atau mengorbankan jasa pada perusahaan tempat bekerja. Seorang petani, dapat mengakui pendapatan pada saat menjual hasil pertaniannya. Demikian juga seorang pedagang, saat adanya penjualan diakui adanya pendapatan, tanpa memperhatikan uang telah diterima atau belum (walaupun pedagang melakukan penjualan secara kredit atau memberi bon kepada pelanggannya).

Pendapatan pada perusahaan dagang seperti pada perusahaan eceran (*ritel*), pedagang besar (*wholesaler*), entitas manufaktur, dan agen dapat berasal dari penjualan barang dagangan (*Sales of*

Merchandise). Pendapatan perusahaan jasa seperti perusahaan yang bergerak di bidang salon adalah pendapatan jasa (*fees*), penginapan pendapatannya dalam bentuk pendapatan sewa. Pendapatan perbankan dalam bentuk pendapatan bunga (*interest income*),

Pendapatan secara akuntansi dapat digolongkan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan non usaha. Pendapatan usaha diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan. Pendapatan dari perusahaan pengolahan barang diperoleh dengan menjual produk (barang jadi). Pendapatan usaha perusahaan dagang dari penjualan barang dagang. Pendapatan perusahaan jasa diperoleh dari pemberian jasa dari konsumen. Pendapatan usaha dilaporkan dalam laporan laba rugi pos yaitu akun penjualan.

Pendapatan yang diperoleh selain kegiatan pokok perusahaan dapat kita sebut pendapatan non usaha. Contoh : perusahaan menjual aktiva tetap perusahaan yang tidak dipakai lagi. Perbedaan antara kedua jenis pendapatan tersebut adalah bahwa pendapatan usaha terjadi adanya transaksinya bersifat rutin dari aktivitas utama dalam entitas sedangkan pendapatan non usaha diperoleh dari selain aktivitas utama entitas.

1. Pendapatan Usaha

Penjualan (*Sales*)

Penjualan mencerminkan kegiatan atau aktivitas perusahaan. Pengurang dari penjualan adalah adanya penjualan yang dikembalikan (retur penjualan), potongan penjualan (rabat penjualan) dan potongan tunai (*discount*). Penyajian akun-akun tersebut untuk mencerminkan informasi yang lengkap pada laporan laba rugi. Nilai penjualan yang dikembalikan (retur penjualan) sebagai bahan evaluasi pimpinan perusahaan atau manajer terkait kebijakan penjualan. Penyajian penjualan dalam laporan laba rugi dilihat tabel berikut:

Penjualan :		
Penjualan		30.000.000,-
Kurang :		
Potongan penjualan tunai (<i>discount</i>)	4.000.000,-	
Retur dan rabat penjualan	3.500.000,-	
		(7.500.000,-)
Penjualan netto (bersih)		22.500.000,-

Keterangan:

a. Penjualan

Penjualan menunjukkan besarnya penjualan yang terjadi selama periode tertentu. Akun penjualan mencakup seluruh penjualan yang terjadi, baik penjualan secara tunai dan secara kredit. Pencatatan kegiatan penjualan sesuai harga yang telah disepakati bersama.

b. Potongan tunai.

Jika pembeli membayar dalam periode yang telah ditentukan maka akan memperoleh potongan tunai. Besarnya potongan tunai tergantung pada syarat penjualan yang telah disepakati.

Contoh syarat penjualan 2/5-n/30, berarti bahwa apabila pembeli melunasi atau membayar utangnya dalam tempo lima hari atau kurang dari lima hari sejak tanggal penjualan akan memperoleh potongan 2 persen, pembayaran atau pelunasan utang paling lama tiga puluh hari sesudah tanggal transaksi.

Contoh :

Jumlah penjualan Rp 100.000,- ; Syarat Penjualan 4/10.-n/60

Tanggal penjualan (faktur/nota) 12 Agustus 2020.

Konsumen membayar tanggal 22 Agustus 2020 atau sebelum tanggal tersebut, jumlah kas yang akan diterima adalah :

Penjualan = Rp 100.000,-

Potongan Tunai = 4 % x Rp 100.000,- = Rp 4.000,-

Jumlah uang yang diterima (Penjualan Neto) = (100.000,- - 4.000,-
= Rp 96.000,-)

Jika konsumen membayar setelah tanggal 22 Agustus 2020, pembeli harus membayar penuh sebesar Rp 100.000,-.

c. Retur penjualan.

Jika barang yang dibeli konsumen di kembalikan kepada penjual maka disebut retur penjualan. Pengembalian barang dapat disebabkan karena barang rusak selama pengiriman, barang cacat, barang tidak berfungsi, spesifikasi barang tidak sesuai dengan yang dipesan atau karena sebab-sebab yang lain. Bila barang yang dikembalikan diterima oleh penjual, maka jumlah barang tersebut dicatat dalam akun tersendiri yaitu akun retur penjualan. Jika penjual atau perusahaan meminta agar barang yang telah dibeli tidak usah dikembalikan, sebagai imbalannya barang yang tidak sesuai dengan keinginan pelanggan disepakati oleh penjual untuk dikurangi. Pengurangan demikian dinamakan rabat (*allowance*) dan dicatat dalam akun rabat penjualan. Biasanya besarnya retur dan rabat penjualan relatif kecil, terkadang dua pos ini digabungkan dan diberi nama retur dan rabat penjualan (*return & allowance*). Nilai nominal retur dan rabat penjualan tergantung jumlah barang yang dikembalikan atau pada potongan yang diberikan oleh penjual.

d. Potongan dagang (*trade discount*)

Potongan dagang adalah penjualan barang yang lebih rendah dari harga resminya (yang tercantum dalam katalog harga). Contoh : harga di katalog Rp100.000,-, tetapi dijual dengan harga Rp 90.000,-. Bila terjadi keadaan demikian, maka harga yang dianggap sebagai harga transaksi adalah sebesar Rp 90.000,00, sebab kenyataannya jumlah ini yang telah disepakati. Potongan atau discount banyak terjadi saat peristiwa tertentu atau bulan-bulan tertentu, misalnya akhir tahun atau menjelang Hari Raya.

2. Pendapatan non usaha

Pendapatan non usaha merupakan besarnya penerimaan dari selain aktivitas utama perusahaan (pendapatan sampingan), yang dapat meliputi:

1) Pendapatan Bagi Hasil

Akun ini menunjukkan besarnya bagi hasil yang diperoleh perusahaan jika menyimpan dananya atau uangnya dalam bentuk deposito, obligasi, giro di bank syariah. Entitas selain bank dan Lembaga keuangan mengakui pendapatan

semacam ini digolongkan sebagai pendapatan non usaha. Untuk bank dan lembaga keuangan lainnya, mengakui pendapatan bunga sebagai pendapatan utama (pendapatan usaha) dan tidak sebagai pendapatan non usaha.

2) Pendapatan Dividen

Pendapatan dividen diperoleh jika perusahaan menanamkan uangnya dalam bentuk saham, baik saham prioritas maupun saham biasa. Pemegang saham akan menerima pembagian laba yang disebut dividen.

3) Pendapatan Sewa

Pendapatan sewa diperoleh jika perusahaan menyewakan sebagian aktivitya kepada pihak luar. Contoh perusahaan menyewakan sebagian mobil, gedung dan sebagainya yang tidak digunakan kepada konsumen. Pendapatan sewa diakui sebagai pendapatan usaha bila perusahaan tersebut bergerak di bidang persewaan.

4) dan sebagainya

Penyajian pendapatan non usaha dalam laporan laba rugi akan disajikan tersendiri dalam kelompok pendapatan non-usaha, seperti tabel berikut:

Pendapatan non usaha :	
Pendapatan bagi hasil	15.000.000,-
Pendapatan dividen	2.500.000,-
Pendapatan sewa	25.000.000,-
Jumlah pendapatan non-usaha	42.500.000,-

2.1.2 Pendapatan Vs Penerimaan Kas

Apakah pendapatan sama dengan penerimaan kas ?. Pendapatan berbeda dengan penerimaan kas. Pada akhirnya memang pendapatan akan berwujud penerimaan kas, tetapi laporan laba rugi disusun untuk periode tertentu dan bersifat *tentative* (sementara).

Kondisi tertentu pendapatan yang telah diperoleh belum diikuti dengan penerimaan kas (Sugiarto, 2020). Contoh : pendapatan usaha diasumsikan terjadi pada saat terjadinya transaksi penjualan. Kondisi yang lain terjadi saat yang sama perusahaan telah menyerahkan barang atau jasa dan pada saat itu pula perusahaan telah berhak untuk menerima uang (pembayaran). Jika pembayaran dilakukan pada saat itu juga, maka penjualan swama dengan penerimaan kas. Kas belum diterima jika pembayaran dilakukan di hari selanjutnya. Penerimaan kas yang belum diterima bukan diartikan belum atau tidak terjadi penjualan. Walaupun kas belum diterima tetapi aktivitas penjualan telah terjadi dan pendapatan tetap diakui pada saat itu juga

Kondisi sebaliknya jika transaksi penjualan belum terjadi, namun telah diterima uang. Contoh : perusahaan sewa gamelan menerima uang sewa gamelan untuk bulan depan, atau saudara membayar harga perjalanan tiket kereta untuk berlibur di saudara untuk bulan depan. Apakah pendapatan sewa tersebut harus diakui (dilaporkan) sebagai penerimaan atau pendapatan bulan ini atau sebagai pendapatan bulan depan?. Bila pendapatan tersebut diakui sebagai pendapatan bulan depan disebut apa uang sewa gamelan atau tiket tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan diatas, kita gunakan konsep pendapatan yaitu pendapatan harus diakui pada saat barang diserahkan atau jasa (penjualan) terjadi, baik jasa tersebut telah dinikmati atau belum dinikmati. Pendapatan akan dilaporkan sebagai pendapatan bulan depan untuk penerimaan kas pada bulan ini, sedangkan untuk uang muka sewa gamelan atau tiket tersebut dilaporkan sebagai utang atau kewajiban. Karena dengan menerima uang muka pendapatan sewa tersebut, perusahaan mempunyai kewajiban (utang) untuk mengembalikannya. Maksud pengembalian adalah kita harys mengembalian baik bentuk jasa atau pelayanan, yaitu dengan menyewakan gamelan atau memberikan transportasi ke tempat tujuan yang sudah ditentukan.

Contoh lainnya, perusahaan menanamkan uangnya dalam bentuk deposito pada bank BNI sebanyak Rp100.000.000,-, dengan jasa 2 % per bulan pada tanggal 1 Januari 2020 selama tiga bulan. Saat jatuh tempo deposito akan diperoleh jasa dan pokok deposito. Jasanya baru akan diterima tanggal 30 Maret 2020, namun pada bulan januari perusahaan telah memperoleh pendapatan sebesar 2 % x

Rp100.000.000,- = Rp 2.000.000,-. Pada saat itu juga perusahaan mengakui tagihan yang sama kepada bank. Keadaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1 Januari	1 Februari	1 Maret	30 Maret
Pendapatan Rp 2.000.000,-	Pendapatan Rp 2.000.000,-	Pendapatan Rp 2.000.000,-	
Piutang	Piutang	Piutang dan penerimaan kas	

Misalkan: perusahaan memperoleh pendapatan untuk lima tahun mulai tanggal 1 April 20x1 sebanyak Rp3.000.000,00 sebagai uang muka sewa bangunan. Pengakuan pendapatan oleh perusahaan baru dapat dicatat pada tanggal 1 April sampai 31 Desember 20x1 atau sebesar Rp450.000,00 ($= 9/12 \times \text{Rp}3.000.000,00 \times 1/5$). Dengan demikian alokasi penerimaan kas sebanyak Rp3.000.000,00 pada tanggal 1 April akan dialokasikan untuk setiap tahun yang menikmatinya, yang tampak sebagai berikut:

2.1.3 Pengertian Dan Klasifikasi Biaya

Pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa disebut biaya (Nelson and Lau, 2014). Untuk menjalankan aktivitas usahanya, perusahaan membutuhkan suatu usaha (*efforts*) yang dicerminkan dalam biaya. Biaya ada yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan pokok perusahaan, tetapi ada pula biaya yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan pokok perusahaan. Biaya yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan pokok disebut biaya usaha, sedangkan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan usaha pokok disebut biaya non usaha.

1. Pengertian Biaya (*Expenses*)

Biaya adalah seluruh pengeluaran, beban-beban atau utang yang timbul terkait usaha untuk memperoleh pendapatan atau dengan waktu terjadinya penurunan atau timbulnya utang tersebut. Dengan demikian biaya tidak hanya menyangkut pengeluaran kas saja, tetapi juga termasuk penurunan aktiva lain selain kas dan atau kenaikan utang. Biaya dapat dikaitkan secara langsung dengan terjadinya pendapatan, dan biaya juga dapat

dikaitkan dengan waktu terjadinya biaya tersebut. Misalnya dalam usaha bioskop, biaya untuk pemutaran film "Spiderman" terdiri atas biaya-biaya yang terkait dengan:

- a) Pendapatan penjualan karcis seperti: biaya iklan di surat kabar, biaya iklan keliling, biaya iklan di radio, biaya sewa film, pajak iklan (reklame), biaya pembuatan poster dan sebagainya;
- b) Waktu terjadinya, seperti: biaya gaji pegawai, biaya gaji manajer, biaya listrik, biaya telepon, biaya pemakaian air, biaya depresiasi gedung, biaya depresiasi projector, kursi dan sebagainya.

2. Klasifikasi Biaya

1) Biaya Usaha (*Operating Expenses*)

Setiap perusahaan memiliki jenis dan macam biaya berbeda-beda, tergantung pada jenis usahanya. Perusahaan jasa, biaya usaha dikelompokkan menjadi dua bagian pokok yaitu:

a. Biaya Pemasaran (*Marketing Expenses*)

Biaya pemasaran mencakup seluruh biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelanggan dan menyampaikan barang ke tangan pembeli. Biaya pemasaran dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu biaya untuk mendapatkan pesanan (*order getting expense*) seperti biaya iklan, biaya advertensi, biaya promosi, biaya gaji staf pemasaran, biaya tamu dan biaya untuk memenuhi pesanan (*order filing expense*) seperti biaya gaji pramuniaga, biaya pengiriman barang, biaya pembungkusan dan sebagainya.

b. Biaya Administrasi dan Umum (*General and Administrative Expenses*).

Biaya administrasi mencakup biaya-biaya yang terjadi di dalam penyelenggaraan pengarahannya, pengawasan dan pelaksanaan tugas-tugas perusahaan. Biaya administrasi umum seperti :

- a) Gaji dewan komisaris;
- b) Gaji dan insentif manajemen (dewan direksi);
- c) Gaji pegawai kantor;
- d) Sewa kantor;

- e) Biaya telepon dan internet;
- f) Biaya penasehat hukum;
- g) Biaya listrik;
- h) Dan lain-lain.

Berikut ini contoh laporan laba rugi Bioskop Fire tahun 2020 :

Bioskop Fire
Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 (Rupiah)

Penjualan (hasil penjualan souvenir)		110.000.000,-
Biaya Usaha		
Biaya pemasaran :		
Advertensi	17.500.000,-	
Pamflet dan poster	2.500.000,-	
Pajak tontonan	2.900.000,-	
Angkutan	3.250.000,-	
		26.150.000,-
Biaya administrasi :		
Gaji pegawai	8.000.000,-	
Sewa film	8.500.000,-	
Sewa Gedung	7.500.000,-	
Gaji pimpinan	5.000.000,-	
Telepon dan listrik	4.500.000,-	
Biaya lain-lain	1.500.000,-	
		35.000.000,-
Jumlah biaya usaha		
		61.150.000,-
Laba Usaha		
		48.850.000,-

2) Biaya non-usaha

Selain biaya usaha dan harga pokok penjualan dalam perusahaan sering juga terjadi biaya yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan pokok perusahaan. Biaya-biaya demikian dikelompokkan tersendiri dalam kelompok Biaya non usaha. Contoh : perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan sering meminjam uang dari bank atau kreditur. Dengan adanya pinjaman tersebut perusahaan akan menanggung beban bunga (biaya bunga). Oleh karena kegiatan pokok perusahaan tersebut bukan dalam bidang simpan pinjam, maka biaya bunga harus dikelompokkan sebagai biaya non usaha.

3) Biaya Produksi (Harga pokok produksi)

Dalam perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi biaya produksi merupakan biaya sehubungan dengan pengolahan produk tersebut. Sebagai contoh pada perusahaan pembuatan sepatu, terjadi biaya biaya seperti biaya bahan sepatu (kulit, plastik, paku, lem dan sebagainya), biaya tenaga kerja (seperti upah tukang gunting, tukang jahit, mandor dan sebagainya) biaya-biaya lain yang diperlukan untuk menjaga kelancaran produksi (seperti listrik, air, depresiasi alat-alat, dan sebagainya). Untuk tujuan akuntansi, biaya produksi dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Biaya Bahan baku,

Biaya bahan baku meliputi biaya (harga pokok) bahan yang menjadi bagian utama dari barang jadi. Contoh : Bahan baku produksi sepatu adalah kulit asli atau kulit sintetis, bahan baku produksi gula adalah tebu dan lainnya. Untuk menghitung bahan baku yang digunakan selama periode tertentu, dapat digunakan cara seperti menghitung harga pokok penjualan, yaitu dengan cara pembelian bahan baku (*neto*) ditambah persediaan bahan baku awal dan dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir (lihat ikhtisar berikut):

Biaya bahan baku

Pembelian bahan baku (bersih)	5.750.000,-	
Ongkos angkut pembelian	350.000,-	
		6.100.000,-
Potongan tunai pembelian	575.000,-	
Retur dan rabat pembelian		
		(925.000,-)
Pembelian (bersih)	5.175.000,-	
Persediaan bahan baku, awal	600.000,-	
Bahan baku tersedia untuk diolah	5.775.000,-	
Persediaan bahan baku akhir	(400.000,-)	
Biaya pemakaian bahan baku		5.375.000,-

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung

Biaya ini meliputi upah dan gaji karyawan langsung yang ikut ambil bagian dalam proses produksi. Contohnya dalam perusahaan sepatu, biaya tenaga kerja langsung antara lain;

gaji dan upah tukang gunting kulit, tukang jahit sepatu dan tukang gosok atau semir sepatu.

3. Biaya Produksi Tidak Langsung.

Biaya produksi tidak langsung atau sering dikenal dengan biaya overhead pabrik mencakup seluruh biaya produksi yang tidak dapat dikelompokkan sebagai biaya bahan baku atau sebagai biaya tenaga kerja langsung. Jenis biaya ini antara lain (dalam perusahaan sepatu); biaya lem, paku, semir, benang, upah mandor, depresiasi mesin, depresiasi bangunan pabrik, biaya listrik, bahan bakar dan sebagainya.

Biaya produksi selama periode tertentu dihitung dengan cara menjumlahkan elemen-elemen biaya bahan baku, tenaga kerja langsung dan biaya produksi tidak langsung. Bilamana terdapat persediaan barang dalam proses, maka ditambah dengan sediaan barang dalam proses awal dan dikurangi dengan sediaan barang dalam proses akhir.

Misalnya, perusahaan Alas Kaki memiliki data biaya sebagai berikut:

Persediaan barang jadi awal	Rp 1.300.000,-
Persediaan barang jadi akhir	Rp 1.500.000,-
Persediaan barang dalam proses awal	Rp 750.000,-
Persediaan barang dalam proses akhir	Rp 800.000,-
Pemakaian bahan baku	Rp 5.500.000,-
Gaji dan upah karyawan langsung	Rp 4.400.000,-
Biaya produksi tidak langsung	
Bahan pembantu (lem, paku, semir dan benang)	Rp 220.000,-
Tenaga kerja tidak langsung (mandor)	Rp 1.500.000,-
Depresiasi mesin	Rp 1.250.000,-
Listrik dan air	Rp 130.000,-
Bahan bakar	Rp 250.000,-

Dari data tersebut dapat disajikan perhitungan biaya produksi sebagai berikut :

Perusahaan Alas Kaki
Perhitungan Biaya Produksi
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

Biaya Produksi :		
Bahan baku		5.500.000,-
Biaya tenaga kerja langsung		4.400.000,-
Biaya produksi tidak langsung :		
Bahan pembantu	220.000,-	
Tenaga kerja tidak langsung	1.500.000,-	
Depresiasi mesin	1.250.000,-	
Listrik dan air	130.000,-	
Bahan bakar	250.000,-	
		3.350.000,-
		13.250.000,-
Persediaan barang dalam proses awal		
		750.000,-
		14.000.000,-
Persediaan barang dalam proses akhir		
		800.000,-
Biaya produksi		
		13.200.000,-

Selanjutnya, perusahaan dapat menghitung harga pokok penjualan dengan cara jumlah biaya produksi ditambah dengan persediaan barang jadi awal, kemudian dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir. Dari data perusahaan Alas Kaki dibuat laporan harga pokok penjualan sebagai berikut:

Perusahaan Alas Kaki
Laporan Harga Pokok Penjualan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

Persediaan barang jadi awal	1.300.000,-
Biaya produksi (lihat perhitungan biaya produksi)	13.200.000,-
Tersedia untuk dijual	14.500.000,-
Persediaan barang jadi akhir	1.500.000,-
Harga pokok penjualan	13.000.000,-

2.2 Harga Pokok Penjualan

Selain biaya usaha dalam perusahaan dagang (seperti distributor, pedagang besar, usaha ritel, usaha toko dan sejenisnya) ada akun biaya yang amat penting untuk diperhitungkan sebagai pengurang penjualan. Akun ini adalah harga pokok dari barang-barang yang dijual atau sering disebut harga pokok penjualan (*cost of sales*). Harga pokok penjualan terdiri atas harga beli barang ditambah dengan ongkos angkut pembelian. Sebagai contoh, perusahaan menjual sebuah TV, jumlah yang dibayar kepada dealer adalah Rp2.500.000,-, ongkos angkut Rp150.000,- bila televisi tersebut telah terjual, maka harga pokok penjualan televisi tersebut adalah Rp2.650.000,- = Rp 2.500.000,- + Rp150.000,-.

Cukup mudah untuk menghitung harga pokok penjualan, bila barang yang dibeli jumlahnya relatif sedikit. Jika barang yang dijual jumlahnya banyak, berbagai jenis dan harganya berbeda-beda. Maka untuk menentukan besarnya harga pokok penjualan adalah harga beli ditambah ongkos angkut pembelian. Jadi yang dihitung adalah harga pokok penjualan untuk keseluruhan barang yang dijual.

Contoh = selama tahun 2020 perusahaan telah melakukan pembelian sejumlah produk seharga RP 5.500.000,00, ongkos angkut pembelian selama tahun tersebut adalah Rp500.000,00. Dengan demikian harga pokok penjualan (HPP) dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{HPP} &= \text{Pembelian} + \text{Ongkos Angkut Pembelian} \\ &= \text{Rp } 5.500.000,- + \text{Rp } 500.000,- \\ &= \text{RP } 6.000.000,-\end{aligned}$$

Cara agar mudah dalam menentukan harga pokok penjualan maka setiap pembelian barang dagangan dicatat dalam akun pembelian dan setiap terjadi biaya angkut pembelian dicatat dalam akun ongkos angkut pembelian. Jika dalam transaksi penjualan terdapat potongan tunai penjualan, retur dan rabat penjualan, maka harga pokok penjualan dengan menggunakan konsep sebelumnya dengan mempertimbangkan potongan tersebut, bila ada (terjadi). Misalnya, selama tahun 2020 dari pembelian produk tersebut ternyata terdapat potongan tunai pembelian (karena perusahaan membayar tepat dalam periode potongan) sebesar Rp 100.000,- dan terdapat pembelian yang

dikembalikan kepada si penjual sebanyak Rp50.000,-. Bila terjadi kondisi demikian, maka harga pokok penjualan produk tersebut dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{HPP} &= (\text{Pembelian} + \text{Ongkos Angkut Pembelian}) - (\text{Potongan Tunai} + \text{Retur dan Rabat Pembelian}) \\
 &= (\text{Rp } 5.500.000,- + \text{Rp } 500.000,-) - (\text{Rp } 100.000,- + \text{Rp } 50.000,-) \\
 &= \text{RP } 5.850.000,-
 \end{aligned}$$

Atau dalam laporan Laba Rugi dihitung sebagai berikut:

Harga Pokok Penjualan		
Pembelian		5.500.000,-
Ongkos angkut		500.000,-
		6.000.000,-
Potongan tunai pembelian	100.000,-	
Retur dan rabat pembelian	50.000,-	
		150.000,-
Harga Pokok Penjualan		5.850.000,-

Dalam praktik sering terjadi pada akhir periode akuntansi, masih ada barang yang belum laku (terjual) demikian juga pada awal periode masih terdapat sisa pembelian (persediaan) dari tahun sebelumnya. Lalu bagaimanakah memperlakukan pos-pos ini? Persediaan akhir tentu saja akan mengurangi harga pokok penjualan (Hpp), karena persediaan akhir merupakan bagian pembelian yang belum terjual. Sebaliknya Hpp akan bertambah, bila persediaan awal ikut terjual dalam periode penjualan. Misalnya dengan menggunakan contoh sebelumnya, ternyata pada akhir periode terdapat barang dagangan yang belum terjual seharga Rp.250.000,00 dan pada awal periode (akhir periode tahun sebelumnya) masih ada persediaan barang dagangan seharga Rp 1.500.000,00. Dengan adanya informasi tambahan ini, maka harga pokok penjualan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Hpp} &= (\text{Pembelian} + \text{Ongkos Angkut Pembelian}) - (\text{Potongan Tunai} \\
 &\quad \text{Pembelian} + \text{Retur dan Rabat Pembelian}) + (\text{Persediaan} \\
 &\quad \text{Awal} - \text{Persediaan Akhir}) \\
 &= (\text{Rp } 5.500.000,- + \text{Rp } 500.000,-) - (\text{Rp } 100.000,- + \text{Rp } 50.000,-) \\
 &\quad + (\text{Rp } 1.500.000,- - \text{Rp } 250.000,-) \\
 &= \text{Rp } 7.100.000,-
 \end{aligned}$$

Atau dalam laporan laba rugi, harga pokok penjualan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

Harga Pokok Penjualan		
Pembelian		5.500.000,-
Ongkos angkut		500.000,-
		6.000.000,-
Potongan tunai pembelian	100.000,-	
Retur dan rabat pembelian	50.000,-	
		(150.000,-)
Pembelian netto (bersih)		5.850.000,-
Persediaan barang dagang awal		1.500.000,-
Barang dagang tersedia untuk dijual		7.350.000,-
Persediaan barang dagang akhir		(250.000,-)
Harga pokok penjualan		7.100.000,-

Dari perhitungan di atas, terdapat istilah baru yaitu pembelian netto atau pembelian bersih dan barang dagangan yang tersedia untuk dijual. Pembelian netto menunjukkan jumlah pembelian bersih dalam arti harga beli barang dagangan setelah diperhitungkan dengan faktor-faktor yang menambah harga beli (ongkos angkut pembelian) dan yang mengurangi harga beli (potongan tunai dan retur/rabat pembelian). Barang yang tersedia untuk dijual adalah jumlah barang dagangan yang dimiliki perusahaan dan siap untuk dijual sewaktu-waktu. Akun penjualan bersih dan barang tersedia untuk dijual hanya ada pada saat perhitungan Laba Rugi saja.

2.3 Pengertian Laba Dan Bentuk Laporan Laba Rugi

Tujuan pokok didirikannya suatu perusahaan adalah untuk memperoleh laba. Namun banyak orang yang menafsirkan istilah laba dengan cara yang berlainan. Ada yang memberi pengertian bahwa laba

merupakan selisih penerimaan dan pengeluaran, atau selisih penjualan dengan harga pokok penjualan, atau selisih pendapatan dengan biaya dan sebagainya. Laba sebenarnya dari suatu perusahaan barulah dapat ditentukan apabila kegiatan perusahaan telah berakhir. Namun laporan laba tidaklah perlu menunggu sampai saat tersebut terjadi, Laporan keuangan dibuat agar pengelola perusahaan dapat mengarahkan dan mengawasi kegiatan usahanya. Untuk itu dibuat laporan berkala untuk tujuan tersebut. Laba atau rugi untuk suatu periode terjadi karena adanya proses pembandingan (*matching*) antara pendapatan dengan biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh pendapatan tersebut dan beban-beban lain yang terjadi selama perolehan pendapatan tersebut. Dengan demikian laba (rugi) merupakan sisa bersih. Laba dalam pengertian ini dikenal dengan istilah laba bersih (*net income*).

Laba bersih dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu; (1) Laba Bersih sebelum Pajak (Penghasilan) dan (2) Laba Bersih sesudah Pajak (Penghasilan). Laba bersih sebelum pajak adalah jumlah laba sebelum dibebani dengan pajak atas laba tersebut. Pajak atas laba ini dikenal dengan istilah pajak penghasilan. Besarnya pajak penghasilan umumnya adalah sebesar 10%, 20% atau 30% dari laba kena pajak. Laba bersih sebelum pajak setelah dikurangi dengan pajak penghasilan disebut laba bersih sesudah pajak (*net income after taxes*). Informasi laba bersih sesudah pajak ini penting bagi pemilik perusahaan, karena merupakan hak yang menjadi bagiannya.

Untuk menilai kegiatan usaha perusahaan, pengelola perusahaan perlu mengetahui berapa jumlah laba yang berasal dari hasil kegiatan dari usaha pokok saja. Jumlah laba ini dapat dihitung dengan cara mengurangi pendapatan bersih usaha dengan harga pokok penjualan dan biaya usaha. Hasil dari pengurangan ini disebut laba usaha (*operating income*).

Selain laba usaha dikenal pula jenis lain, yaitu laba kotor (*gross margin/gross profit*). Informasi tentang laba kotor ini sangat penting, terutama bagi perusahaan dagang untuk memperkirakan tingkat penghasilan yang diperoleh perusahaan. Laba kotor diperoleh dari selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan. Tingkat perbedaan yang besar maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.

2.3.1 Jenis Laporan Laba Rugi

Sebagaimana dalam neraca terdapat dua bentuk neraca, yakni bentuk laporan (*staffel*) dan bentuk akun (*rekening*), dalam laporan laba rugi juga dikenal dua jenis laporan yaitu:

Langkah Tunggal (*single step*)

Dalam laporan laba rugi langkah tunggal hanya dikenal satu jenis laba saja yaitu, laba bersih setelah pajak. Dengan demikian isi laporan bentuk langkah tunggal hanya terdiri dari dua bagian yaitu, bagian pendapatan (penjualan bersih dan pendapatan lain-lain) dan bagian biaya (harga pokok penjualan, biaya usaha dan biaya non-usaha). Contoh dari laporan laba rugi bentuk langkah tunggal dapat dilihat di bawah ini.

Contoh 1: Laporan Laba Rugi Bentuk Langkah Tunggal suatu Perusahaan Jasa.

Usaha Berkah	
Laporan Laba Rugi	
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020	
Pendapatan :	
Penjualan jasa reparasi dan service	28.500.000,-
Pendapatan bunga deposito	5.000.000,-
	33.500.000,-
Biaya :	
Gaji pegawai	4.800.000,-
Sewa bengkel	2.750.000,-
Bahan habis pakai	750.000,-
Pajak penghasilan	5.025.000,-
	13.325.000,-
Laba bersih	20.175.000,-

Contoh 2: Laporan Laba Rugi Bentuk Langkah Tunggal suatu Perusahaan Dagang.

Usaha Dagang Mantap	
Laporan Laba Rugi	
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020	
Pendapatan :	
Penjualan bersih	36.000.000,-
Pendapatan bunga tabanas	5.550.000,-

Pendapatan sewa		3.750.000,-
		<u>45.300.000,-</u>
Biaya-biaya :		
Harga pokok penjualan	22.500.000,-	
Gaji pegawai toko	2.700.000,-	
Biaya bahan habis pakai	1.080.000,-	
Biaya bunga	360.000,-	
Pajak penghasilan	2.790.000,-	
		<u>29.439.000,-</u>
Laba bersih		15.861.000,-

Langkah Laba Rugi Langkah Bertahap (*multiple step*)

Bentuk laporan laba rugi bertahap ini mengenal berbagai jenis laba sebelum sampai pada laba bersih setelah pajak. Bentuk laporan laba rugi ini sangat banyak digunakan, sebab memberikan informasi yang lebih baik. Contoh, dengan menggunakan laporan laba rugi bentuk tunggal dari Usaha Bengkel Maju dan Usaha Dagang Sri Rezeki sebelumnya dapat disusun kembali dalam bentuk laporan laba rugi bertahap sebagai berikut:

Contoh 1: Laporan Laba Rugi Jenis Langkah Bertahap suatu Perusahaan jasa.

Usaha Berkah
Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Pendapatan Jasa Reparasi dan Service		Rp28.500.000,00
Biaya Usaha:		
Gaji Pegawai	Rp4.800.000,00	
Sewa Bengkel	<u>Rp2.750.000,00</u>	
Bahan Habis Pakai	Rp 750.000,00	
		<u>(Rp 8.300.000,00)</u>
Laba Usaha		Rp20.200.000,00
Pendapatan Biaya Non-Usaha:		
Pendapatan Bunga Deposito		Rp5.000.000,00
Biaya Non-Usaha		<u>Rp 5.000.000,00 +</u>
Laba Bersih Sebelum Pajak		Rp25.200.000,00
Pajak Penghasilan		<u>(Rp 5.025.000,00)</u>
Laba Bersih Setelah Pajak		<u>Rp20.175.000,00</u>

Contoh 2: Laporan Laba Rugi Jenis Langkah Bertahap Suatu Perusahaan Dagang.

Usaha Dagang Mantap Laporan Laba Rugi Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Penjualan bersih		36.000.000,-
Harga pokok penjualan		<u>22.000.000,-</u>
Laba Kotor		14.000.000,-
Biaya usaha :		
	Gaji pegawai toko	2.700.000,-
	Bahan habis pakai	<u>1.080.000,-</u>
		3.780.000,-
Laba Usaha		10.220.000,-
Pendapatan dan biaya non usaha :		
Pendapatan bunga Tabanas	5.550.000,-	
Pendapatan sewa	3.750.000,-	
	9.300.000,-	
Biaya bunga	<u>360.000,-</u>	
Pendapatan non usaha bersih		<u>8.940.000,-</u>
Laba bersih sebelum pajak		19.160.000,-
Pajak penghasilan		<u>2874.000,-</u>
Laba bersih setelah pajak		16.286.000,-

2.4 Isu Dalam Pelaporan Laba Rugi

Menurut (Giri, 2014), salah satu isu pelaporan laba rugi yaitu : kesalahan dan perubahan prinsip akuntansi. Entitas bisnis dapat memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten pada transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya yang serupa. Tetapi entitas juga bisa melakukan perubahan, sepanjang perubahan itu sesuai PSAK. Entitas dapat merubah kebijakan akuntansi dengan mempertimbangkan : perubahan itu disyaratkan sesuai PSAK, menghasilkan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi. Perubahan akuntansi, perubahan estimasi dan koreksi perlu pelaporan khusus. Pengaruh perubahan itu harus dilaporkan terpisah. Contoh perubahan nilai sediaan dari metode FIFO menjadi metode rata-rata, perubahan metode depresiasi dari metode garis lurus menjadi jumlah angka tahun. Perubahan estimasi dilakukan karena

ketidakpastian yang melekat dalam aktivitas bisnis. Akibat perubahan itu akan berdampak pada laporan laba rugi baik pada periode perubahan saja atau baik periode saat itu dan yang akan datang. Contoh perubahan taksiran umur manfaat aset tetap mesin. Perubahan ini tidak hanya berpengaruh pada periode perubahan taksiran tapi juga periode yang akan datang. Selain itu adanya koreksi kesalahan yang disebabkan salah perhitungan, salah menerapkan metode akuntansi, salah menggunakan fakta-fakta yang ditemukan saat menyusun laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Giri, E. F. 2014. *Akuntansi Keuangan Menengah 1*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nelson, L. and Lau, P. 2014. *Akuntansi Keuangan (Intermediate Financial Reporting)*. 2nd edn. Jakarta: Salemba Empat.
- Prihadi, T. 2017. *Mudah Memaami Laporan Keuangan*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Sugiarto, S. 2020. *Pengantar Akuntansi*. Tangerang Selatan, Jakarta: Universitas Terbuka.

BAB 3

PIUTANG

Oleh Amelia Rizky Alamanda

3.1 Pengertian Piutang Usaha

Piutang adalah suatu hak pembayaran yang dimiliki suatu entitas terhadap suatu pihak/entitas karena telah mendapatkan manfaat atas suatu produk atau jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya.

Piutang merupakan jenis aktiva lancar karena memiliki jatuh tempo yang pendek (kurang dari satu periode pelaporan), dapat memiliki bunga, dan memiliki konsekuensi atas denda apabila telat dalam pembayarannya.

3.2 Klasifikasi Piutang

Dalam sebuah entitas, piutang diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu :

1. Piutang Usaha

Piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan oleh entitas. Dalam kegiatan normal entitas, piutang usaha biasanya akan dilunasi dalam tempo kurang dari satu tahun, sehingga piutang dikelompokkan ke dalam aktiva lancar.

Contoh :

PT ABCED adalah sebuah distributor laptop di BEC Bandung, menjual produknya kepada Pemkot Bandung dengan nilai Rp 300.000.000. Pemkot Bandung baru membayar Rp 100.000.000 dan sisanya akan dilunasi bulan berikutnya. Atas transaksi ini jurnal yang perlu dibuat adalah

Dr. Kas	Rp 100.000.000
Dr. Piutang Usaha	Rp 200.000.000
Cr. Penjualan	Rp 300.000.000

2. Piutang Non-Usaha

Piutang yang timbul bukan sebagai bagian akibat dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan entitas, misalnya DP pembelian barang, klaim atas kerusakan atau kehilangan, klaim restitusi pajak, pengakuan dividen, dll.

Contoh :

PT ABCDE memberikan pinjaman kepada karyawan sebesar Rp 10.000.000.

Dr. Piutang Karyawan	Rp 10.000.000
Cr. Kas	Rp 10.000.000

3.3 Pencatatan, Pengukuran Dan Penyajian Piutang

Piutang dicatat dan diakui sebesar nilai bruto (nilai jatuh tempo) dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak akan diterima.

Piutang dicatat sebesar jumlah yang diestimasi akan dapat ditagih. Karena itu dalam proses pengelolaan piutang, perusahaan harus membuat cadangan piutang tak tertagih yang merupakan taksiran jumlah piutang yang diestimasi tidak dapat ditagih dalam periode tersebut.

Misalnya:

PT ABCDE memiliki piutang per 31 Desember 2021 senilai Rp 400.000.000, sedangkan cadangan kerugian piutangnya adalah Rp 140.000.000. Maka, penyajian dalam laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut :

Piutang Usaha	Rp 400.000.000
Cadangan Kerugian Piutang	(Rp 140.000.000)
Piutang Bersih (Net)	Rp 260.000.000

3.4 Dasar Pencadangan Piutang Tak Tertagih

Dalam menghitung estimasi piutang tak tertagih terdapat dua dasar yang dapat dijadikan acuan, yaitu :

1. Presentasi dari Total Penjualan

Cadangan kerugian piutang tak tertagih didasarkan pada presentase tertentu dari saldo akun penjualan pada saat cadangan kerugian tersebut ditetapkan atau pada taksiran jumlah penjualan kredit pada periode berjalan.

2. Saldo Piutang

- a. Presentase saldo piutang, cadangan kerugian ditentukan berdasarkan saldo akun piutang pada periode perhitungan
- b. Analisis umur piutang, cadangan kerugian piutang didasarkan pada besaran risiko atau kemungkinan tidak tertagih di periode berjalan.

Contoh :

PT ABCDE pada akhir tahun 2021 melaporkan piutangnya sebagai berikut :

Piutang Usaha	Rp 1.300.000.000
Penjualan	Rp 8.000.000.000
Penjualan Kredit	Rp 3.200.000.000

Berdasarkan buku pembantu piutang diketahui saldo piutang terdiri dari piutang kepada beberapa pihak ketiga seperti pada tabel berikut :

Tanggal	Nama Pihak Ketiga	Jumlah
10/10/2021	Toko Insya Allah	Rp 100.000.000
26/10/2021	Bapak Parno	Rp 200.000.000
12/11/2021	Toko Cinta Mati	Rp 300.000.000
28/11/2021	Toko BEC	Rp 100.000.000
5/12/2021	PT Gembirasaja	Rp 200.000.000
19/12/2021	Toko Merdeka	Rp 100.000.000
23/12/2021	Toko Sejahtera	Rp 300.000.000

Berdasarkan pengalaman beberapa tahun berakhir PT ABCDE menyimpulkan bahwa semakin lama umur piutang maka semakin besar kemungkinan tidak tertagihnya.

PT ABCDE membuat beberapa asumsi sebagai berikut :

- Umur piutang 1 s.d 15 hari 1%
- Umur piutang 16 s.d 30 hari 5%
- Umur Piutang 31 s.d 45 hari 10%
- Umur piutang 46 s.d 60 3%
- Umur piutang >60 hari 20%

Pada awal tahun 2022, PT ABCDE membuat beberapa perhitungan cadangan kerugian piutang berdasarkan tiga metode yang telah disebutkan di atas.

1. Total Penjualan

Misalnya, PT ABCDE menetapkan 1% dari total penjualan kredit. Maka, jumlah cadangan piutang tak tertagih adalah sebagai berikut

$$1\% \times \text{Rp } 3.200.000.000 = \text{Rp } 32.000.000$$

Dan pencatatan yang dibuat adalah sebagai berikut :

Dr. Beban Kerugian Piutang	Rp 32.000.000
Cr. Cadangan Kerugian Piutang	Rp 32.000.000

2. Saldo Piutang

Misalnya, PT ABCDE menetapkan 10% dari total saldo piutang. Maka jumlah cadangan piutang adalah sebagai berikut :

$$10\% \times \text{Rp } 1.300.000.000 = \text{Rp } 130.000.000$$

Dan pencatatan yang dibuat adalah sebagai berikut :

Dr. Beban Kerugisn Piutang	Rp 32.000.000
Cr. Cadangan Kerugian Piutang	Rp 32.000.000

3. Analisis Umur Piutang

Misalnya, PT ABCDE menetapkan pencadangan piutang sesuai dengan asumsi berikut :

- Umur piutang 1 s.d 15 hari 1%
- Umur piutang 16 s.d 30 hari 3%
- Umur Piutang 31 s.d 45 hari 5%
- Umur piutang 46 s.d 60 10%
- Umur piutang >60 hari 20%

PT ABCDE akan membuat tabel pencadangan kerugian piutang sebagai berikut :

Tanggal	Nama Pihak Ketiga	Jumlah	Umur Piutang				
			1 s.d 15	16 s.d 30	31 s.d 45	46 s.d 60	➤ 61
10/10/2021	Toko Insyah Allah	Rp 100.000.000					Rp 20.000.000
26/10/2021	Bapak Parno	Rp 200.000.000					Rp 40.000.000
12/11/2021	Toko Cinta Mati	Rp 300.000.000				Rp 30.000.000	
28/11/2021	Toko BEC	Rp 100.000.000			Rp 5.000.000		
5/12/2021	PT	Rp		RP			

	Gembirasaja	200.000.000		6.000.000			
19/12/2021	Toko Merdeka	Rp 100.000.000	Rp 1.000.000				
23/12/2021	Toko Sejahtera	Rp 300.000.000	Rp 3.000.000				
			Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 5.000.000	Rp 30.000.000	Rp 60.000.000
							Rp 105.000.000

Pencatatan yang perlu dibuat adalah sebagai berikut :

Dr. Beban Kerugian Piutang

Rp 105.000.000

Cr. Cadangan Kerugian Piutang

Rp 105.000.000

3.5 Penghapusan Piutang

Cadangan kerugian piutang ditetapkan pada awal periode akuntansi dan merupakan estimasi besarnya piutang tak tertagih pada suatu periode akuntansi. Namun, pada saat berlalunya waktu, seringkali terdapat sejumlah piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih sehingga harus dihapuskan karena berbagai alasan. Biasanya karena bangkrut, meninggal atau sebab lain. Penghapusan ini akan mempengaruhi posisi dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan.

Dalam menghapus piutang tak tertagih, ada dua metode yang dapat digunakan yaitu :

A. Metode Cadangan Kerugian

Metode penghapusan piutang yang dilakukan dengan cara setiap hari periode ditentukan taksiran jumlah kerugian piutang. Taksiran piutang tak tertagih dan Taksiran kerugian piutang tak tertagih ini dicatat ke rekening kerugian Piutang sisi debet dan Cadangan Kerugian Piutang di sisi kredit.

B. Metode Penghapusan Langsung (*Direct Write Off*)

Metode penghapusan piutang dengan cara langsung menghapus piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih tanpa pencadangan terlebih dahulu.

Contoh :

PT ABCDE menetapkan cadangan kerugian tahun 2022 adalah senilai Rp 150.000.000. Pada tanggal 2 Februari 2022, ternyata Toko Insa

Allah tidak dapat ditagih lagi senilai Rp 20.000.000 karena bangkrut. Maka, pencatatan yang dapat dibuat adalah sebagai berikut :

Metode Cadangan

Saat Pembentukan Cadangan

1/1/2022

Dr. Beban Kerugian Piutang Tak Tertagih Rp 150.000.000

Cr. Cadangan Kerugian Piutang Tak Tertagih

Rp150.000.000

Saat Penghapusan Piutang

2/2/2022

Dr. Cadangan Kerugian Piutang Tak Tertagih Rp 20.000.000

Cr. Piutang

Rp 20.000.000

Metode Penghapusan Langsung

Saat Pembentukan Cadangan

--- Tidak Ada Jurnal ---

Saat Penghapusan Piutang

2/2/2022

Dr. Beban Kerugian Piutang Tak Tertagih

Rp 20.000.000

Cr. Piutang

Rp 20.000.000

DAFTAR PUSTAKA

BAB 4

PENILAIAN PERSEDIAAN

Oleh Rosanna Purba

4.1 Pengertian Persediaan

Persediaan adalah barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan untuk membuat produk yang akan dijual. Jenis persediaan perusahaan biasanya ditentukan oleh sifat operasinya. Perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur biasanya memiliki persediaan. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengubah bahan mentah menjadi produk setengah jadi dan produk jadi, sedangkan perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuknya.

Menurut PSAK 14 tahun 2014, persediaan adalah aset:

- a) Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;
- b) Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; atau
- c) Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Persediaan merupakan salah satu aset yang dapat segera ditarik untuk menambah kas pada saat persediaan tersebut dijual, sehingga termasuk dalam aset lancar. Khusus untuk entitas yang harus memiliki produk berwujud untuk dijual atau dimanfaatkan untuk menghasilkan barang untuk dijual, persediaan merupakan salah satu aset lancar yang sangat berharga.

4.2 Jenis Persediaan

Persediaan barang dagangan adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan barang yang dibeli untuk dijual kembali dalam perusahaan dagang. Ungkapan yang digunakan dalam pencatatan akuntansi masih “persediaan barang dagangan”, meskipun dapat mencakup banyak jenis. Misalnya, supermarket merupakan salah satu contoh perusahaan dagang dimana pada supermarket terdapat berbagai variasi barang-barang makanan seperti makanan dalam kaleng, daging, buah, makanan ringan dan berbagai jenis bumbu

masakan akan tetapi dalam pengkategorian pencatatan tetap menggunakan akun persediaan barang dagang. Demikian juga untuk berbagai variasi barang-barang lainnya karena barang-barang makanan di atas hanya sebagian kecil dari persediaan yang dimiliki oleh supermarket tersebut. Persediaan tersebut di atas memiliki dua identitas penting, yaitu (1) dimiliki oleh perusahaan, dan (2) disiapkan untuk dijual kepada konsumen. Akibatnya, hanya ada satu klasifikasi persediaan yang disebut persediaan barang dagangan dalam perusahaan dagang. Persediaan ini mencakup semua jenis barang dagangan yang dimiliki oleh perusahaan.

Perusahaan yang memproduksi barang juga memiliki persediaan. Perbedaan antara persediaan di perusahaan manufaktur dan persediaan di perusahaan dagang adalah tidak semua persediaan di perusahaan dagang disiapkan untuk dijual. Akibatnya, persediaan barang yang dimiliki di perusahaan manufaktur dapat dicatat dengan menggunakan berbagai macam bentuk akun dalam pencatatannya. Untuk mengidentifikasi jenis persediaan yang dimiliki perusahaan, setiap kategori persediaan akan diberi istilah yang berbeda.

Berikut ini merupakan jenis-jenis persediaan yang terdapat pada perusahaan manufaktur, yaitu:

- a) Bahan mentah
Bahan mentah merupakan persediaan berupa barang yang akan digunakan sebagai input dalam proses produksi.
- b) Barang dalam proses
Barang dalam proses merupakan persediaan berupa barang yang sedang diproduksi dan belum selesai dikerjakan.
- c) Barang jadi
Barang jadi merupakan persediaan berupa barang yang sudah selesai diproduksi dan dipersiapkan untuk dijual kepada pelanggan.

4.3 Kepemilikan Persediaan

Saat persiapan penyusunan laporan keuangan dibutuhkan informasi mengenai kuantitas persediaan yang tersedia untuk dijual atau yang akan digunakan dimana persediaan tersebut dimiliki oleh perusahaan pada satu periode waktu tertentu. Penentuan jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan sangat penting untuk dipahami

karena ternyata jumlah persediaan yang harus dicatat tidak selamanya yang kelihatan di perusahaan saja akan tetapi ada kalanya persediaan yang masih dalam perjalanan harus dicatat juga. Hak kepemilikan merupakan salah satu dasar yang dapat digunakan dalam pencatatan sebagai persediaan pada perusahaan. Pada dasarnya barang-barang akan selalu dicatat oleh perusahaan pemilik barang-barang tersebut sebagai persediaan, akan tetapi terdapat beberapa keadaan yang mengakibatkan kesulitan untuk menentukan hak kepemilikan pada saat terjadinya perpindahan barang dari pihak penjual kepada pembeli.

Menurut Baridwan (2021, hal. 153), berikut keadaan sekaligus cara untuk menentukan hak kepemilikan perusahaan atas persediaan yaitu:

a) Barang-barang dalam perjalanan (*Goods in Transit*)

Sulit untuk menentukan apakah barang yang masih dalam perjalanan pada tanggal neraca masih menjadi milik penjual atau telah terjadi perpindahan hak kepemilikan kepada pembeli. Hak kepemilikan barang akan tergantung pada syarat pengiriman barang yang telah disepakati sebagai berikut:

1) *FOB (Free On Board) Shipping point*

Ketika produk dikirim kepada pihak pengangkutan, pembeli memperoleh hak atas barang yang dikirim. Persediaan kemudian dikurangi oleh penjual dan mencatat penjualan, sebaliknya persediaan kemudian bertambah pada pembeli dan mencatat pembelian. Masalah akan timbul apabila pada tanggal penyusunan laporan keuangan masih terdapat barang-barang yang masih dalam perjalanan. Identitas barang dalam perjalanan pada tanggal neraca harus ditetapkan agar laporan keuangan akurat.

2) *FOB (Free on Board) Destination*

Hak atas barang baru berpindah pada pembeli jika barang-barang yang dikirim sudah diterima pembeli. Akibatnya, tanggal pembeli menerima barang menjadi tanggal penyerahan hak milik atas persediaan tersebut. Pada saat hal ini terjadi, pelanggan mencatat pembelian dan menambah persediaannya sementara penjual mengurangi persediaannya dan mencatat penjualan. Untuk menghitung secara akurat jumlah persediaan pada tanggal neraca, harus diidentifikasi terlebih dahulu apakah barang dalam perjalanan milik penjual atau pembeli.

b) Barang yang dipisahkan (*Segregated Goods*)

Kadang-kadang terdapat sebuah kontrak untuk penjualan barang dalam jumlah besar karena tidak dapat dipasok sekaligus. Meskipun barang belum diserahkan, pembeli telah memperoleh hak atas barang terpisah yang diperlukan untuk memenuhi kontrak. Akibatnya, setiap barang yang dipisahkan harus dikeluarkan dari persediaan penjual pada tanggal penyusunan laporan keuangan dan dilaporkan sebagai penjualan. Demikian juga dengan pembeli dapat mencatat pembelian sehingga meningkatkan persediaannya.

c) Barang-barang Konsinyasi (*Consignment Goods*)

Pihak yang menitipkan barang-barang (*consignor*) akan tetap mempunyai hak kepemilikannya sampai barang-barang yang dititipkan untuk dijual (dikonsinyasikan) tersebut terjual. Barang-barang tersebut masih dalam persediaan pengirim sebelum dijual. Pihak yang menerima titipan (*consignee*) tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut sehingga tidak dicatat sebagai persediaan. Pada saat barang-barang itu sudah terjual maka *consignee* melaporkan kepada *consignor* selaku pihak yang menitipkan. Pada saat itu, *consignor* akan mencatat penjualan dan mengurangi persediaan barangnya.

d) Penjualan Angsuran (*Installment Sales*)

Pada penjualan angsuran, sampai seluruh harga jual dibayar dengan mencicil, penjual tetap memiliki kepemilikan atas produk. Penjual akan mencatat barang-barang tersebut dalam persediaannya dikurangi dengan jumlah yang sudah dibayar. Pembeli akan memasukkan barang-barang itu ke dalam persediaannya dan melaporkannya sesuai dengan harga yang dibayarkan untuk barang-barang itu. Jika diyakini kecil kemungkinan batalnya penjualan, baik pembeli maupun penjual dapat menganggapnya sebagai pembelian biasa dengan pembayaran cicilan.

4.4 Metode Pencatatan Persediaan

Pencatatan persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode periodik/fisik dan metode perpetual/buku.

a) Metode periodik/fisik

Pada metode ini, buku besar tidak mencerminkan kuantitas persediaan karena setiap pergerakan masuk dan keluar dari persediaan tidak dicatat dalam akun persediaan. Hanya pada akhir periode akuntansi pencatatan dibuat dengan menimbang, mengukur, dan menghitung secara fisik barang-barang di gudang. Biaya persediaan hanya dapat ditentukan setelah persediaan akhir karena tidak ada catatan mutasi, yang juga membuat tidak mungkin untuk mengetahui harga pokok penjualan setiap saat. Berikut cara perhitungan harga pokok penjualan:

Persediaan barang awal	Rp.xxx	
Pembelian (neto)	<u>Rp.xxx (+)</u>	
Tersedia untuk dijual	Rp.xxx	
Persediaan barang akhir		<u>Rp.xxx (-)</u>
Harga pokok penjualan		<u>Rp.xxx</u>

Selama periode berjalan pencatatan terhadap mutasi persediaan yaitu:

- 1) Jurnal untuk mencatat pembelian

Pembelian	Rp. xxx	
Hutang dagang/kas		Rp. xxx
- 2) Jurnal untuk mencatat penjualan

Piutang dagang/kas	Rp. xxx	
Penjualan		Rp. Xxx

b) Metode buku (Perpetual)

Pada metode ini, semua jenis persediaan akan dibuatkan kartu persediaan. Kartu persediaan tersebut sekaligus sebagai media pengawasan terhadap mutasi persediaan dan ketersediaan persediaan di gudang. Kartu persediaan terdiri dari kolom barang masuk atau pembelian, kolom barang keluar atau penjualan, dan saldo persediaan. Masing-masing kolom disajikan detail untuk kuantitas dan harga perolehannya. Setiap mutasi persediaan akan diikuti dengan pencatatan dalam kartu persediaan sehingga saldo persediaan dapat diketahui sewaktu-waktu melalui kolom saldo pada kartu persediaan. Sesungguhnya penggunaan metode perpetual akan lebih memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan karena tidak perlu mengadakan perhitungan fisik persediaan.

Selama periode berjalan pencatatan terhadap mutasi persediaan yaitu :

- 1) Jurnal untuk mencatat pembelian

Persediaan	Rp. xxx	
Hutang dagang/kas		Rp. xxx
- 2) Jurnal untuk mencatat penjualan

Piutang dagang/kas	Rp. xxx	
Penjualan		Rp. xxx
Harga pokok penjualan	Rp. xxx	
Persediaan		Rp. xxx

Pada gambar di bawah ini disajikan contoh kartu persediaan.

Tgl	Pembelian			Penjualan			Saldo		
	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
Apr'20									
1							20	400	8.000
5	25	450	11.250				25	450	11.250
8	20	500	10.000				20	500	10.000
							65		29.250
10				20	400	8.000	10	450	4.500
				15	450	6.750	20	500	10.000
				35		14.750	30		14.500
14	15	600	9.000				10	450	4.500
							20	500	10.000
							15	600	9.000
							45		23.500
22				10	450	4.500			
				20	500	10.000			
				5	600	3.000	15	600	9.000
				35		17.500	15	600	9.000

Gambar 4.1 : Contoh Kartu Persediaan

Berdasarkan gambar di atas dijelaskan bahwa setelah kolom tanggal terdapat kolom pembelian untuk mencatat mutasi persediaan masuk dengan rincian informasi unit, harga dan jumlahnya. Demikian juga pada kolom penjualan terdapat catatan mutasi persediaan keluar dengan rincian informasi unit, harga dan jumlahnya. Pada kolom harga tersebut dicatat sebesar harga pokok penjualannya. Selanjutnya bagian

terakhir terdapat catatan mengenai saldo persediaan dengan rincian informasi yang sama yaitu unit, harga dan jumlahnya.

4.5 Biaya Perolehan Persediaan

Menurut PSAK 14 tahun 2014, persediaan harus diukur pada harga terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih (*the lower of cost and net realizable value*). Persediaan harus diakui sebesar harga perolehannya, yaitu seluruh biaya yang terjadi mulai dari membeli persediaan, pengangkutan persediaan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai persediaan siap untuk dijual atau digunakan.

Selain biaya perolehan persediaan (*inventory cost*) masih terdapat juga beban periodik (*period expenses*). Kedua jenis biaya tersebut merupakan dua biaya yang berbeda perlakuannya dimana sering kali terjadi kesalahan dalam pengelompokannya. Biaya perolehan persediaan merupakan kelompok biaya yang dikapitalisasi (dicatat sebagai aset) sebagai persediaan tetapi pada saat terjual akan dicatat juga sebagai beban yaitu harga pokok penjualan. Sedangkan beban periodik merupakan biaya yang tidak berhubungan dengan perolehan persediaan melainkan biaya yang dibebankan pada periode terjadinya.

Menurut Kartikahadi *et al.* (2019, hal. 338), komponen biaya perolehan adalah sebagai berikut:

- a) Biaya pembelian
Harga beli, bea masuk dan pajak lainnya (kecuali yang kemudian dapat ditagihkan kembali ke kantor pajak), biaya pengangkutan, penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dikaitkan pada perolehan barang dagangan, bahan baku dan bahan pelengkap produksi merupakan yang termasuk dalam biaya pembelian. Apabila terdapat diskon dagang, rabat, dan pos lainnya yang sejenis akan mengurangi biaya pembelian.
- b) Biaya konversi
Pada perusahaan manufaktur, di mana bahan mentah dan perlengkapan lainnya dibeli dan kemudian diubah melalui proses produksi menjadi barang jadi untuk dijual, biaya konversi berlaku. Biaya konversi adalah biaya yang didistribusikan secara sistematis yaitu biaya overhead tetap dan variabel yang dikeluarkan dalam proses mengubah bahan baku menjadi barang

jadi. Biaya ini berbanding lurus dengan jumlah unit yang diproduksi.

c) Biaya lain-lain

Biaya lain-lain hanya diperhitungkan sebagai bagian dari persediaan sepanjang biaya tersebut dikeluarkan untuk mempersiapkan persediaan untuk dijual atau digunakan. Biaya menciptakan produk untuk konsumen tertentu atau overhead non-manufaktur adalah dua contoh dari biaya ini. Namun, biaya berikut ini harus segera dicatat sebagai beban pada saat terjadinya daripada dimasukkan sebagai persediaan:

- 1) Pemborosan bahan baku, upah tenaga kerja, atau biaya produksi lainnya yang tidak biasa;
- 2) Biaya penyimpanan, kecuali jika diperlukan dalam proses produksi sebelum melanjutkan ke tahap produksi berikutnya;
- 3) Biaya administrasi dan umum yang tidak mempunyai peran dalam menempatkan barang pada suatu tempat atau keadaan yang memungkinkan untuk dijual;
- 4) Biaya penjualan.

4.6 Harga Pokok Persediaan

Pada umumnya perusahaan akan membeli dan menjual persediaan beberapa kali dengan harga yang berbeda dalam satu periode. Harga mana yang akan digunakan untuk mengevaluasi persediaan dan harga pokok penjualan akan menjadi perhatian mengingat harga yang berbeda ini. Terdapat 3 (tiga) metode yang dapat digunakan untuk menilai persediaan dan harga pokok penjualan berdasarkan pada biaya perolehan (*acquisition cost*), sebagai berikut:

a) Identifikasi Khusus (*Specific Identification*)

Metode identifikasi khusus diperuntukkan untuk perusahaan yang memiliki produk yang unik dan khusus dan biasanya bernilai tinggi. Misalnya perhiasan, barang antik dan karya seni. Setiap jenis persediaan akan dikelompokkan berdasarkan harga pokoknya. Pendekatan ini melibatkan banyak tenaga kerja ekstra dan membutuhkan gudang yang cukup besar.

b) Rata-rata Tertimbang (*Weighted Average*)

Persediaan yang digunakan dalam pembuatan atau penjualan dicatat dengan menggunakan biaya rata-rata pada metode ini. Dengan membagi harga pokok produk yang tersedia untuk dijual (persediaan awal dan pembelian) dengan jumlah unit yang tersedia untuk dijual, harga pokok penjualan rata-rata ditentukan. Pendekatan periodik dan perpetual memiliki nilai yang berbeda untuk persediaan akhir dan harga pokok penjualan.

Metode Periodik

Hanya pada akhir periode akan ditentukan biaya rata-rata per unit.

Metode Perpetual

Setiap melakukan pembelian biaya rata-rata per unit akan dihitung sehingga dinamakan metode biaya rata-rata bergerak (*moving average method*).

c) Masuk Pertama Keluar Pertama/*First In First Out* (MPKP/*FIFO*)

Pada metode FIFO produk yang pertama kali dibeli adalah yang pertama kali terjual. Harga pokok barang terbaru akan diterapkan pada persediaan akhir. Dengan menggunakan pendekatan periodik atau perpetual, metode ini akan menghasilkan persediaan akhir dan harga pokok penjualan yang sama.

d) Masuk Terakhir Keluar Pertama/*Last In First Out* (MTKP/*LIFO*)

Menurut metode ini, persediaan yang terakhir dibeli adalah yang dijual terlebih dahulu. Harga pokok persediaan paling awal yang diperoleh akan diterapkan pada persediaan akhir. Metode ini dilarang oleh IAS 2 dan PSAK 14, dan IASB memilih untuk mengecualikannya karena tidak secara akurat mencerminkan arus persediaan aktual. Metode ini hanya dapat digunakan untuk alasan pajak di negara tertentu jika digunakan untuk akuntansi. Ketika biaya produk meningkat, menggunakan pendekatan LIFO untuk tujuan perpajakan akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dan laba bersih yang lebih rendah, yang juga akan mengurangi beban pajak.

4.7 Penilaian Persediaan

Nilai persediaan yang akan dimasukkan dalam laporan posisi keuangan ditentukan melalui penilaian persediaan. Tergantung pada teknik penilaian yang digunakan, nilai persediaan akan berubah. Ada banyak pendekatan untuk penilaian persediaan yang dapat diterapkan. Metode penilaian persediaan terdiri dari:

- a) Metode Harga Pokok
Dengan pendekatan ini, tidak ada perbedaan yang dibuat antara biaya persediaan akhir dan nilai persediaan akhir dalam laporan posisi keuangan. Biaya persediaan dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan identifikasi khusus, FIFO/MPKP, LIFO/MTKP, dan rata-rata tertimbang.
- b) Metode Harga Pokok atau Nilai Realisasi Bersih yang Terendah
Persediaan akan dihitung menggunakan metode ini pada harga pokok penjualan atau harga pasar mana yang lebih rendah.
- c) Metode Harga Jual
Ketika menilai persediaan pada harga jual bersihnya, penyimpangan dari konsep harga pokok diperbolehkan dalam keadaan berikut:
 - 1) Produk pasti akan dapat segera dijual dengan harga yang telah ditetapkan.
 - 2) Merupakan produk standar, dengan pasar yang mampu menampung serta menentukan harga awalnya.
 - 3) Hasil produk peternakan/pertanian dan pertambangan logam mulia (emas dan perak) biasanya disimpan dan dinilai sebesar harga jualnya.

4.8 Metode Taksiran Persediaan

Penghitungan fisik persediaan untuk pencatatan persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan metode fisik. Perhitungan fisik mungkin tidak selalu dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, sehingga penaksiran digunakan untuk menentukan jumlah persediaan. Ketika persediaan fisik hilang, rusak, atau hancur karena kebakaran, bencana alam, dan kondisi tidak terduga lainnya maka metode estimasi terkadang perlu digunakan. Teknik laba kotor dan metode harga eceran adalah dua metode untuk memperkirakan jumlah persediaan pada tanggal tertentu.

a) Metode Laba Bruto

Menggunakan informasi dari tahun-tahun sebelumnya, metode ini menghitung persentase laba kotor berdasarkan penjualan atau harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan dihitung dengan mengalikan persentase laba kotor dengan penjualan dan dikurangi dari penjualan. Persediaan akhir adalah selisih antara harga pokok penjualan dan produk yang tersedia untuk dijual.

Dalam situasi berikut, jumlah persediaan biasanya ditentukan dengan menggunakan metode laba kotor:

- 1) Untuk menentukan berapa banyak persediaan yang diperlukan untuk menyusun laporan interim.
- 2) Untuk memprediksi jumlah persediaan yang rusak karena terbakar dan menentukan jumlah barang sebelum terjadinya kebakaran. Biasanya dilakukan untuk keperluan klaim asuransi.
- 3) Untuk memverifikasi jumlah persediaan yang ditentukan dengan cara yang berbeda dari biasanya.
- 4) Untuk memprediksi taksiran harga pokok penjualan, persediaan akhir dan laba bruto.

Contoh soal

Berikut merupakan informasi yang diperoleh dari laporan laba rugi perusahaan:

Penjualan	Rp 6.000.000
Persediaan (awal)	Rp 2.000.000
Produksi	Rp 8.000.000

Diketahui laba kotornya sebesar 30% margin atas penjualan.

Penyelesaian:

Persediaan awal	Rp 2.000.000
Produksi	<u>Rp 8.000.000</u>
Barang tersedia untuk dijual	Rp 10.000.000
Penjualan	Rp 6.000.000
Laba bruto	<u>Rp 1.800.000</u>
(30% x Rp 6 juta)	
Estimasi harga pokok penjualan	<u>Rp 4.200.000</u>
Estimasi persediaan akhir	Rp 5.800.000

b) Metode Eceran/Ritel

Teknik ritel/eceran biasanya diterapkan di supermarket dan perusahaan ritel lainnya. Biasanya pencatatan dilakukan secara fisik dalam perusahaan sejenis ini. Pendekatan ritel memungkinkan penghitungan seluruh persediaan akhir tanpa penghitungan fisik. Persentase harga pokok untuk periode tertentu digunakan untuk menghitung persediaan pada pendekatan harga eceran. Membandingkan barang tersedia untuk dijual dengan harga pokok dan harga jual merupakan persentase harga pokok. Persediaan akhir pada harga jual adalah persediaan barang yang tersedia untuk dijual pada harga jual dikurangi total penjualan. Persentase harga pokok penjualan dikalikan dengan persediaan akhir yang ditentukan dengan harga jual merupakan menentukan persediaan akhir pada harga pokok.

Pendekatan ritel sering digunakan untuk:

- 1) Memperkirakan jumlah persediaan.
- 2) Mempercepat perhitungan fisik tanpa harus mereview setiap invoice.

Perhitungan fisik digunakan untuk membandingkan dan mengontrol aliran produk.

- 1) Memperkirakan jumlah persediaan barang untuk menyusun laporan keuangan interim.
- 2) Mempercepat perhitungan fisik tanpa mereview setiap invoice.
- 3) Perbandingan dengan perhitungan fisik yang digunakan untuk mengontrol aliran barang.

Contoh soal (dalam Rp 000)

	Biaya	Harga ritel
Persediaan awal	1.200	2.000
Pembelian (net)	<u>15.600</u>	<u>22.000</u>
Barang tersedia untuk dijual	16.800	24.000
Penjualan		<u>20.800</u>
Persediaan akhir		3.200

Penyelesaian:

Persentase biaya : $(16.800:24.000) \times 100\% = 70\%$

Persediaan akhir dengan biaya : $70\% \times 3.200 = 2.240$

4.9 Kesalahan Pencatatan Persediaan

Kesalahan pencatatan persediaan akan berdampak pada kesalahan penyajian laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (neraca). Karena saldo persediaan akhir periode berjalan akan menjadi saldo awal periode berikutnya, kesalahan pencatatan persediaan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mempengaruhi saldo persediaan periode berjalan dan periode berikutnya.

Berikut ini adalah beberapa kesalahan pencatatan persediaan dan pengaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan:

a) Pencatatan persediaan akhir terlalu besar

Periode berjalan:

- Laporan posisi keuangan (neraca) → aset lancar, total aset dan modal menjadi terlalu tinggi.
- Laporan laba rugi → harga pokok penjualan terlalu rendah, sedangkan laba usaha menjadi terlalu tinggi.

Periode berikutnya:

- Laporan posisi keuangan (neraca) → sudah benar karena kesalahan periode lalu telah diimbangi oleh kesalahan periode berjalan.
- Laporan laba rugi → harga pokok penjualan terlalu tinggi, sedangkan laba usaha menjadi terlalu rendah.

b) Pencatatan persediaan akhir terlalu rendah

Periode berjalan:

- Laporan posisi keuangan → aset lancar, total aset dan modal menjadi terlalu rendah.
- Laporan laba rugi → harga pokok penjualan terlalu tinggi, sedangkan laba usaha menjadi terlalu rendah.

Periode berikutnya:

- Laporan posisi keuangan → sudah benar karena kesalahan periode lalu telah diimbangi oleh kesalahan periode berjalan.

- Laporan laba rugi → harga pokok penjualan terlalu rendah, sedangkan laba usaha menjadi terlalu tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Z. 2021. *Intermediate Accounting*. 9 ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2014. "PSAK No. 14: Persediaan." Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kartikahadi, H. *et al.* 2019. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK dan IFRS, Buku 1*. Edisi Kedu. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

BAB 5

DEPRESIASI, PENURUNAN NILAI, DAN DEPLESI

Oleh Aries Veronica

5.1 Pendahuluan

Aset tetap merupakan salah satu sumber daya perusahaan yang mendukung operasional perusahaan. Oleh karena itu aset tetap sangat diharapkan bermanfaat bagi perusahaan semaksimal mungkin dengan jangka waktu panjang. Namun hal tersebut cukup mustahil mengingat aset tetap tersebut digunakan secara terus menerus sehingga mengakibatkan penurunan manfaat akan aset tetap tersebut. Penurunan masa manfaat aset tetap berwujud terutama yang memiliki masa manfaat panjang disebut penyusutan (*depreciation*).

Semua aset tetap kecuali tanah dikenakan dengan penyusutan yang umumnya akan dicatat di akhir periode laporan keuangan sejalan dengan umur ekonomis dan masa manfaat aset tetap itu habis bahkan sampai dengan nilai aset tetap tersebut bernilai nol. Perusahaan dapat menentukan metode penyusutan apa yang cocok dengan perusahaannya.

Sejak berlakunya Standar Akuntansi Keuangan konvergensi IFRS, penurunan nilai atau *impairment* dijadikan perhatian dari berbagai pihak. Dalam PSAK 48 berbasis IFRS menjelaskan penurunan nilai bukan hanya untuk aset tetap tetapi juga untuk aset tak berwujud, seperti: *goodwill*, investasi dan aset keuangan lainnya. Penurunan untuk aset tetap tak berwujud disebut dengan amortisasi.

Selain depresiasi dan amortisasi, penurunan aset untuk sumber daya alam dikenal dengan istilah depleksi. Depleksi muncul pada aset disebabkan adanya biaya yang berkurang dalam mengelola sumber daya tersebut dijadikan bahan baku atau persediaan.

5.2 Depresiasi

5.2.1 Pengertian

Depresiasi adalah penurunan atau berkurangnya nilai aset tetap kecuali tanah bersamaan dengan masa manfaat atau umur ekonominya. Dalam konsep akuntansi, depresiasi adalah biaya yang dikeluarkan setiap tahun yang mempengaruhi pendapatan sebelum pajak sehingga dalam laporan keuangan, pengaruh waktu dan pemakaian atas nilai tetap diwakilkan.

Aset yang dapat didepresiasi dikelompokkan menjadi:

a. *Tangible* (Nyata):

Aset tersebut bisa dipegang atau dilihat fisiknya, seperti kendaraan, mesin, peralatan, tanah, dan lain-lain.

b. *Intangible* (Tidak nyata).

Aset tersebut tidak berwujud, seperti paten, hak cipta, atau *franchise*.

Adapun karakteristik dari depresiasi aset tetap, yaitu:

- a. Depresiasi adalah penurunan nilai aset tetap kecuali tanah. Penurunan nilai aset bersifat tetap sampai habis umur ekonomisnya atau sampai dengan nilai sisa.
- b. Depresiasi dalam pencatatannya mengurangi nilai aset yang dilakukan bertahap dan terus menerus sampai dengan habis masa manfaatnya.
- c. Depresiasi merupakan pengalokasian biaya terhadap suatu aset sampai pada masa manfaatnya.
- d. Depresiasi akan mengurangi nilai buku dan nilai pasar aset.
- e. Depresiasi hanya untuk aset tetap berwujud saja.

5.2.2 Faktor – faktor yang mempengaruhi penyusutan aset tetap

a. Biaya Perolehan (*Acquisition Cost*)

Biaya yang termasuk dalam biaya perolehan adalah harga pembelian, biaya pengiriman, biaya pemasangan, bea masuk, dan semua biaya yang melekat pada aset tersebut sampai ke tangan pembeli. Biaya perolehan tersebut dijadikan dasar perhitungan dari biaya penyusutan nantinya.

b. **Perkiraan Umur Ekonomis Aset (*Estimate Economical Life Time of Asset*)**

Umur ekonomis merupakan perkiraan waktu sampai kapan aset tersebut digunakan, seperti periode bulanan, tahunan, atau menggunakan jam operasional dan jumlah unit produksi. Pihak manajemen akan mempertimbangkan banyak faktor menentukan umur ekonomis tersebut. Umumnya pihak manajemen akan menentukan umur ekonomis suatu aset berdasarkan pengalaman masa lalu terhadap aset serupa yang digunakan oleh perusahaan.

c. **Perkiraan Nilai Residu (*Estimate Residual Value of Asset*)** Nilai residu sering juga disebut nilai sisa yang merupakan perkiraan nilai realisasi ketika aset tidak digunakan lagi, dihentikan pemakaiannya, dijual atau berakhir masa manfaatnya. Aset tidak memiliki nilai sisa lagi jika aset digunakan perusahaan sampai usang dan tidak ada manfaatnya lagi. Nilai sisa aset akan besar atau tinggi jika aset digantikan sebelum habis masa manfaatnya atau digunakan dalam waktu singkat oleh perusahaan.

5.2.3 Metode Depresiasi

Metode untuk menghitung depresiasi aset tetap berwujud. Ada dua faktor mempengaruhi besarnya depresiasi, yaitu:

- a. Dasar Penyusutan atau biaya awal aset tetap, yaitu harga perolehan serta nilai buku.
- b. Masa kegunaan aset (umur ekonomis)
- c. Nilai Sisa atau nilai residu

Metode yang sering digunakan untuk depresiasi aset tetap adalah sebagai berikut :

a. Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)

Metode garis lurus merupakan metode depresiasi aset tetap yang paling sederhana dan paling banyak dipakai oleh perusahaan. Metode ini menghasilkan jumlah depresiasi yang sama setiap tahun sampai habis masa manfaat aset tetap tersebut. Rumus metode ini adalah:

$$\text{Depresiasi} = \frac{HP - NS}{n}$$

Dimana :

HP = Harga perolehan
 NS = Nilai sisa
 n = Taksiran umur kegunaan

Sebagai ilustrasi, asumsikan harga perolehan suatu mesin dengan umur ekonomis 4 tahun sebesar Rp25.000.000, dengan estimasi nilai residunya sebesar Rp1.000.000. Berapa nilai depresiasi mesin tersebut dengan metode garis lurus?

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{Depresiasi} &= (\text{Rp}25.000.000 - \text{Rp}1.000.000) : 4 \\ &= \text{Rp}24.000.000 : 4 \\ &= \text{Rp}8.000.000 \text{ per tahun} \end{aligned}$$

b. Metode Jumlah Unit Produksi (*Sum of the Unit Method*)

Metode ini dapat digunakan jika aset diharapkan dapat menghasilkan unit produksi tertentu. Untuk suatu aset dibebankan jumlah beban depresiasi yang sama untuk setiap unit yang diproduksi. Penerapan metode ini umur manfaat dapat dinyatakan dengan unit kapasitas produksi seperti jumlah *output* produksi, mil atau jam. Jumlah depresiasi dapat diperoleh dengan cara penyusutan per unit dikali dengan total unit yang dihasilkan selama periode tertentu. Untuk perusahaan manufaktur, metode ini dapat dinyatakan dalam jumlah produk.

Dua langkah yang dapat digunakan dalam metode unit produksi ini:

Langkah 1. Menentukan penyusutan per unit terlebih dahulu

$$\text{Penyusutan per unit} = \frac{\text{Biaya Perolehan} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Total Unit Produksi}}$$

Langkah 1. Menentukan depresiasi

$$\begin{aligned} \text{Depresiasi} \\ &= \text{Penyusutan per unit} \times \text{Total Unit Produksi yang digunakan} \end{aligned}$$

Sebagai ilustrasi, asumsikan mesin pada contoh sebelumnya memiliki masa manfaat 10.000 jam operasi. Sepanjang tahun mesin tersebut beroperasi selama 2.000 jam.

Langkah 1. Menentukan penyusutan per unit terlebih dahulu

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan per jam} &= \frac{\text{Rp}25.000.000 - \text{Rp}1.000.000}{10.000 \text{jam}} \\ &= \text{Rp}2.400 \text{ per jam} \end{aligned}$$

Langkah 1. Menentukan depresiasi

Depresiasi = Rp2.400 per jam x Rp2.000 jam = Rp4.800.000

c. Metode Saldo Menurun Ganda (*Double Declining Balance Method*)

Metode saldo menurun ganda menghasilkan beban periodik yang terus menurun sepanjang estimasi umur manfaat aset. Untuk menerapkan metode ini, tarif penyusutan garis lurus tahunan terlebih dahulu harus digandakan.

Tiga langkah yang ditempuh dalam menggunakan metode saldo menurun ganda, yaitu:

Langkah 1. Menentukan persentase garis lurus

Langkah 2. Menentukan tarif saldo menurun ganda

Langkah 3. Menghitung depresiasi

Sebagai ilustrasi, asumsikan mesin seperti contoh sebelumnya.

Langkah 1. Persentase garis lurus = $100\% : 4 = 25\%$

Langkah 2. Tarif saldo menurun ganda = $25\% \times 2 = 50\%$

Langkah 3. Depresiasi = $\text{Rp}25.000.000 \times 50\% = \text{Rp}12.500.000$

Depresiasi saldo menurun ganda dapat dilihat dibawah ini:

Tahun	Depresiasi	Akumulasi Depresiasi	Nilai Buku Akhir
1	$\text{Rp}25.000.000 \times 50\%$	$\text{Rp}12.500.000$	$\text{Rp}12.500.000$
2	$12.500.000 \times 50\%$	18.750.000	6.250.000
3	$6.250.000 \times 50\%$	21.875.000	3.125.000
4	24.000.000 - 21.875.000	24.000.000	1.000.000

e. Metode Jumlah Angka Tahun

Metode jumlah angka tahun menghasilkan depresiasi yang menurun setiap periode berikutnya. Depresiasi untuk tahun pertama berjumlah paling besar dan untuk akhir periode depresiasi berjumlah paling sedikit. Setiap periode depresiasi berkurang sesuai dengan estimasi jumlah angka tahun masa manfaat aset. Apabila estimasi masa manfaat n tahun maka cara menghitungnya adalah:

$$JAT = n(n + 1) / 2$$

$$\text{Depresiasi} = (n / JAT) \times (\text{Biaya Perolehan} - \text{Nilai Sisa})$$

Sebagai ilustrasi, asumsikan mesin seperti contoh di atas. Berapa depresiasi tahun pertama sampai tahun ke empat?

Jawab :

$$\begin{aligned} JAT &= n(n + 1) / 2 \\ &= 4(4+1) / 2 \\ &= 20/2 \\ &= 10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Depresiasi} &= (n / JAT) \times (\text{Biaya Perolehan} - \text{Nilai Sisa}) \\ \text{Tahun 1} &= (4/10) \times (\text{Rp}25.000.000 - \text{Rp } 1.000.000) \\ &= \text{Rp}9.600.000 \\ \text{Tahun 2} &= (3/10) \times (\text{Rp}25.000.000 - \text{Rp } 1.000.000) \\ &= \text{Rp}7.200.000 \\ \text{Tahun 3} &= (2/10) \times (\text{Rp}25.000.000 - \text{Rp } 1.000.000) \\ &= \text{Rp}4.800.000 \\ \text{Tahun 4} &= (1/10) \times (\text{Rp}25.000.000 - \text{Rp } 1.000.000) \\ &= \text{Rp}2.400.000 \end{aligned}$$

5.2.4 Perlakuan Akuntansi untuk Depresiasi

Sebelum melakukan analisis perlakuan akuntansi untuk penyusutan, maka perlu dilakukan perhitungan nilai depresiasi

setiap periode yang akan dilaporkan oleh perusahaan dengan menggunakan metode penyusutan yang ada.

1. Setiap penyusutan aset tetap dicatat dengan jurnal.

Jurnal untuk Depresiasi:

Depresiasi - Aktiva Tetap	xxx	
Akumulasi Depresiasi – Aktiva Tetap		xxx

2. Sebelum tutup buku, apabila dalam pencatatan tersebut kesalahan terjadi, maka lakukan koreksi.

Jurnal Koreksi Depresiasi:

Jika mencatat depresiasi terlalu kecil :

Depresiasi – Aktiva Tetap	xxx	
Akumulasi Depresiasi – Aktiva Tetap		xxx

Jika mencatat depresiasi terlalu besar:

Akumulasi Depresiasi – Aktiva Tetap	xxx	
Depresiasi – Aktiva Tetap		xxx

3. Apabila tutup buku sudah dilaksanakan, maka dilakukan jurnal koreksi kesalahan pada aset tetap tersebut.

Jurnal Penyesuaian untuk menambah depresiasi aset tetap yang dicatat terlalu kecil:

Laba	xxx	
Hutang Pajak Tangguhan		xxx
Akumulasi Depresiasi – Aktiva Tetap		xxx

Jurnal Penyesuaian untuk mengurangi depresiasi aset tetap yang dicatat terlalu besar:

Akumulasi Depresiasi – Aktiva Tetap	xxx	
Laba		xxx
Aset Pajak Tangguhan		xxx

5.3 Penurunan Nilai

5.3.1 Pengertian

Menurut PSAK 48, setiap akhir periode laporan keuangan, perusahaan akan menilai apakah terdapat penurunan nilai terhadap aset perusahaan. Apabila ditemukan penurunan nilai terhadap aset perusahaan, maka perusahaan akan memperkirakan biaya yang dikeluarkan untuk memulihkan aset tersebut. Dengan kata lain penurunan nilai aset adalah nilai tercatat aset (*carrying amount*) lebih besar dari jumlah yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*).

5.3.2 Pengukuran Penurunan Nilai

Setelah perusahaan melakukan penilaian aset dan ditemukan adanya gejala penurunan nilai aset, maka hal yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan pengujian atas penurunan nilai aset tersebut. Cara yang dilakukan perusahaan dalam pengujian adalah bandingkan antara jumlah aset yang tercatat dengan jumlah yang dapat dipulihkan. Jika aset yang tercatat lebih tinggi dari jumlah yang dapat dipulihkan, maka selisihnya diakui sebagai rugi penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan tersebut. Jika aset tercatat lebih rendah dari jumlah yang dapat dipulihkan, maka tidak terdapat penurunan nilai. Jika terdapat gejala penurunan nilai, maka entitas diharuskan membuat perkiraan formal jumlah yang dapat dipulihkan.

5.3.3 Metode Penurunan Nilai

Metode penurunan nilai (*impairment method*) adalah metode penentuan penghapusan aset tetap (*fixed asset*) yang berasumsi bahwa penghapusan dilakukan dengan jalan mengurangi nilai aset setiap tahun sehingga beban penghapusan pada tahun pertama akan lebih besar jika dibandingkan dengan periode berikutnya berdasarkan dengan umur ekonomis.

Rumus :

$$\text{Penurunan Nilai Aset} = \text{Nilai Sisa Buku} - \text{Recoverable}$$

Kerugian atas penurunan nilai aset akan menambah depresiasi aset, akibatnya nilai aset akan berubah.

Sebagai ilustrasi PT. MJA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Tahun 2020, perusahaan menambah armada angkutannya dengan membeli 2 mobil senilai Rp800.000.000. Akhir tahun 2021, PT. MJA melakukan evaluasi terhadap harga jual kendaraan tersebut sebesar Rp700.000. Estimasi biaya penjualan sebesar Rp50.000.000 dengan nilai pakai aset senilai Rp680.000.000.

Langkah 1. Mencari nilai sisa buku dan *Recoverable Amount*

$$\begin{aligned}\text{Nilai RA} &= \text{Rp}700.000.000 - \text{Rp}50.000.00 \\ &= \text{Rp } 650.000.000\end{aligned}$$

Nilai Sisa Buku = Nilai Pakai Aset Dengan menggunakan rumus sebelumnya, maka:

$$\begin{aligned}\text{Penurunan Nilai Aset} &= \text{Nilai Sisa Buku} - \text{Recoverable Amount} \\ &= \text{Rp}680.000.000 - \text{Rp}650.000.000 \\ &= \text{Rp}30.000.000\end{aligned}$$

Rugi atas penurunan nilai aset dicatat sebagai berikut:

Rugi penurunan nilai aset	Rp30.000.000
Akumulasi Depresiasi	Rp30.000.000

5.4 Deplesi

5.4.1 Definisi Deplesi

Deplesi merupakan penyusutan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Istilah deplesi digunakan perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam, seperti hasil tambang dan sejenisnya. Pada ilmu biologi, deplesi dipakai sebagai penyusutan atau berkurangnya jumlah senyawa organi pada sel. Deplesi dipakai apabila penyusutannya tidak merugikan, karena memiliki kegunaan pada bagian yang menerima hasil dari penyusutan itu.

Penggunaan sumber daya alam yang terus menerus mengakibatkan cadangan sumber daya alam akan semakin

berkurang bahkan bisa habis. Apabila depresiasi sampai dengan nilai sisa pada aset tetap terjadi, maka aset tersebut dapat diganti dengan aset tetap serupa sehingga perusahaan masih bisa melanjutkan kegiatan operasionalnya dan depresiasi pada aset tetap yang baru dibebankan kembali. Namun lain hal dengan deplesi, hal tersebut tidak mungkin terjadi. Pada deplesi sumber daya alam tidak dapat mengganti sumber daya alam tersebut jika sudah habis, sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan menjalankan kegiatan operasionalnya.

5.4.2 Metode perhitungan Deplesi

1. Metode Biaya

Untuk mencari satuan deplesi, basis harga dibagi dengan jumlah satuan tersisa yang dapat dieksploitasi dari lahan tambang. Pengurangan deplesi diperoleh dari jumlah satuan yang terjual dikalikan dengan satuan. Hal ini hanya berlaku secara umum untuk semua aset yang berasal dari sumber daya alam. Diterapkan untuk semua tipe properti yang dikenai deplesi dan lebih umum digunakan.

2. Metode Persentase

Deplesi dihitung dari persentase pendapatan kotor, dengan syarat jumlah deplesi yang dibebankan tidak melebihi 50% dari pendapatan bersih sebelum pengurangan deplesi. Untuk gas dan minyak diperkenankan untuk membebankan 100%. Umumnya dipakai oleh hampir semua perusahaan tambang kecuali sumber daya alam hutan, seperti: batubara, logam, dan geotermal.

Jika metode persentase diterapkan untuk suatu sumber daya alam, maka beban deplesi harus dihitung menggunakan dua metode deplesi yang ada. Jumlah beban yang lebih besar dapat dipakai untuk mengurangi basis sumber daya.

Rumus mencari besarnya deplesi per unit:

$$\frac{\text{Total Biaya} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Total Estimasi Hasil Yang Diperoleh}}$$

Sebagai ilustrasi, sebuah lahan yang akan dipakai untuk tambang batubara diperkirakan memiliki harga senilai

Rp500.000.000. Dari hasil survei manajemen, lahan itu ditaksir memiliki kandungan tambang sebesar 200.000 ton. Setelah eksploitasi tahun pertama, ternyata nilai taksirannya mencapai Rp50.000.000 sebuah lahan yang akan digunakan untuk tambang batubara ditaksir memiliki harga sebesar Rp500.000.000. Hitunglah deplesi tambang tersebut per ton?

Jawab:

$$\begin{aligned}\text{Deplesi} &= (\text{Rp}500.000.000 - \text{Rp}50.000.000) / 200.000 \\ &= \text{Rp}2.250\end{aligned}$$

Pada metode deplesi, penyusutan senilai Rp2.250 per ton.

Jika tahun berikutnya lahan tambang menghasilkan 25.000 ton, maka deplesi tahun tersebut senilai:

$$\text{Rp}2.250 \times 25.000 = \text{Rp}56.250.000.$$

DAFTAR PUSTAKA

- Herdiyana, D., & Rokhim, M. L. 2021. Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Kppbc Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*.
- Hery, & Lekok, W. 2011. *Akuntansi Keuangan Menengah 2* (1st ed.). Bumi Aksara.
- Kartikahadi, H., Sinaga, R. U., Syamsul, M., & Siregar, S. V. 2012. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Salemba Empat.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. 2008. *Akuntansi Intermediate* (12th ed.). Penerbit Erlangga.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., Duchac, J. E., Suhardianto, N., Kalanjati, D. S., Jusuf, A. Ab., & Djakman, C. D. 2016. *Pengantar Akuntansi* (25th ed.). Salemba Empat.

BAB 6

ASET TIDAK BERWUJUD

Oleh Zainab

6.1 Pendahuluan

Aset tidak berwujud dipakai pada aset yang nilai umurnya lebih dari satu tahun dan tidak memiliki bentuk fisik. PSAK No. 19 (revisi 2000) menyatakan bahwa aset tidak berwujud tidak memiliki bentuk fisik dan identitas yang dapat diidentifikasi dan dipertahankan untuk digunakan dalam pembuatan atau penyerahan barang atau jasa dan disewakan kepada pihak lain. Atau menyatakan bahwa aset tersebut adalah aset nonmoneter yang dimiliki untuk keperluan administrasi. Aset tidak berwujud meliputi:

- 1) Merek
- 2) Piranti lunak komputer(*software*)
- 3) Lisensi dan waralaba
- 4) Hak kekayaan intelektual seperti : hak cipta, paten dan hak kekayaan intelektual lainnya
- 5) Resep, formula, model, desain, dan prototipe
- 6) Aset tidak berwujud dalam pengembangan

6.2 Pengakuan Aset Tidak Berwujud

Pengakuan aset tak berwujud pada saat diperoleh dengan ketentuan :

- 1) Adanya manfaat ekonomis di masa datang bagi yang memilikinya.
- 2) Biayanya bisa diukur

6.3 Penilaian Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud yang Anda miliki dicatat di akun Anda sesuai biaya. Biaya akuisisi itu tergantung pada bagaimana aset tidak berwujud diperoleh. Jika karena pembelian, harga perolehan adalah jumlah yang dihabiskan untuk pembelian sampai tersedia. Jika aset tidak berwujud diperoleh dalam pertukaran untuk aset lain, biaya

perolehan sesuai dengan nilai wajar aset yang diterima atau ditinggalkan. Untuk aset tidak berwujud yang diperoleh dengan imbalan aset serupa lainnya, harga perolehan ditentukan berdasarkan nilai wajar aset yang ditinggalkan. (Baridwan, 2014) Umur panjang, biaya aset tidak berwujud harus diamortisasi, PSAK No. 19 menyatakan bahwa :

Jumlah yang dapat diamortisasikan dari aset tidak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Pada umumnya masa manfaat suatu aset tidak berwujud tidak akan melebihi 20 tahun sejak tanggal aset siap digunakan. Amortisasi harus mulai dihitung saat aset siap digunakan.

Metode penyusutan yang dipakai adalah metode garis lurus
Aset tidak berwujud dijelaskan di bawah ini :

6.3.1 Merek

Merek Dagang dapat didaftarkan untuk perlindungan hukum. Hak untuk menggunakan merek dagang tidak terbatas. Dalam hal ini harga beli yang tercatat adalah harga beli sampai dengan jatuh tempo merek dan seluruh biaya perolehan. Jika Anda membuat tanda ini sendiri, harga pembelian sudah termasuk biaya perencanaan dan pendaftaran. Tidak ada batasan usia sehingga tidak ada penyusutan. (Baridwan, 2014)

Pelaporan akuntansi atas merek dagang adalah :

Merek	Rp xxx
Kas	Rp xxx
Amortisasi merek dicatat dalam jurnal berikut :	
Amortisasi merek	Rp xxx
Merek	Rp xxx

6.3.2 Software

Software adalah program dalam komputer untuk melakukan fungsi dari komputer tersebut. Ada dua jenis perangkat lunak komputer: perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak sistem. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan tugas atau pekerjaan tertentu, dan perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak yang diperlukan perangkat lunak komputer agar berfungsi dengan baik. Perangkat lunak sistem biasanya dibeli dengan pembelian perangkat keras

komputer lainnya. Perangkat lunak aplikasi dapat dibeli secara individual atau Anda dapat membuatnya sendiri. (Weygant, 1995)

6.3.3 Lisensi dan Waralaba

Lisensi atau waralaba adalah hak yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk menggunakan fasilitas yang dimilikinya dengan menggunakan hak merek dagang atau nama dagang, atau untuk menjual barang atau jasa. Pemberi hibah dapat berupa instansi pemerintah atau perusahaan swasta. Akhir-akhir ini perkembangan sistem franchise sektor swasta menunjukkan kemajuan yang pesat. Perkembangan ini muncul karena manfaat yang diberikan oleh sistem waralaba itu sendiri baik bagi masyarakat maupun bagi waralaba itu sendiri. Waralaba dibagi menjadi dua bagian: (1) sistem waralaba produk dan layanan (2) sistem lisensi waralaba merek. Akuntansi untuk pendapatan biaya waralaba sesuai dengan Pernyataan FASB #45. Jika Anda membeli lisensi dan waralaba berdasarkan kontrak, pembayarannya merupakan beban yang diamortisasi selama masa manfaatnya. (Baridwan, 2014)

6.3.4 Paten

Paten adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah yang memungkinkan pemegang hak untuk membuat, menjual, dan menguasai penemuannya untuk jangka waktu tertentu sejak pemberian hak tersebut. Istilah paten juga dapat dihitung berdasarkan unit produk yang diproduksi.

Amortisasi paten

xxx

Paten

xxx

Jika paten digunakan dalam proses manufaktur, amortisasi paten termasuk dalam biaya produksi, tetapi jika paten digunakan dalam kegiatan yang berhubungan dengan penjualan, amortisasi paten termasuk dalam harga pokok penjualan.

6.3.5 Hak Cipta (*Copyright*)

Hak Cipta adalah hak pencipta untuk menerbitkan, menjual, atau menguasai ciptaan. Musik atau

pertunjukan dan karya seni lainnya. Seperti halnya paten, hak cipta merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang dilindungi secara hukum. Hak cipta dapat digunakan, dijual sendiri, atau dialihkan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu. Harga pembelian hak cipta termasuk semua biaya yang terkait dengan pembuatan karya. Ini termasuk biaya pendaftaran dan perolehan hak. Jika Anda membeli hak cipta, harga pembelian adalah jumlah yang Anda bayarkan. Hak Cipta diamortisasi selama masa manfaatnya.

6.3.6 Resep, Formula, Model, Desain dan Prototipe

Resep, resep, desain, dan prototipe adalah penemuan perusahaan dan digunakan untuk menjalankan perusahaan. Mungkin ada kelebihan dan fitur yang membedakan produk kami dengan produk perusahaan lain. Pada umumnya, penemuan resep, formula, model, desain, atau prototipe diajukan oleh perusahaan untuk paten atau hak cipta. (Baridwan, 2014)

6.3.7 Godwill

Yang dimaksud dengan goodwill, seperti lokasi perusahaan yang baik, nama yang terkenal, dan manajer yang kompeten. Dari perspektif akuntansi, niat baik adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba di atas rata-rata berdasarkan faktor-faktor di atas. Keuntungan di atas rata-rata adalah pendapatan dari investasi yang melebihi jumlah yang dapat menarik investor ke bisnis. Menurut (Weygant, 1995) yang dialih bahasakan oleh gina ganiah, mendefinisikan goodwill yaitu Dalam kombinasi bisnis, biaya perolehan (harga pembelian) dibebankan untuk aset berwujud dan bersih yang dapat diidentifikasi bila memungkinkan, dan sisanya dicatat dalam akun aset tidak berwujud yang disebut goodwill. PSAK No. 19(revisi 2000) paragraf 11 dan 12 menyatakan bahwa :

Goodwill yang dihasilkan dari kombinasi bisnis akuisisi mencerminkan pembayaran yang dilakukan oleh pihak pengakuisisi dengan harapan memperoleh keuntungan ekonomi di masa depan.

Aset tidak berwujud dapat dipisahkan dengan jelas dari goodwill jika aset tersebut dapat dipisahkan. Suatu aset jika entitas dapat menyewakan, menjual, menukar, atau mendistribusikan manfaat ekonomi masa depan yang terkandung dalam aset

tersebut tanpa mengabaikan manfaat ekonomik masa depan dari aset lain yang digunakan dalam aktivitas yang sama untuk menciptakan suatu bisnis, dikatakan dapat dipisahkan

Kehendak Tuhan yang dibuat sendiri seharusnya tidak diakui. Goodwill internal adalah biaya perusahaan untuk menghasilkan manfaat ekonomi masa depan, tetapi biaya tersebut bukanlah sumber daya yang dapat diidentifikasi perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan dan dapat diukur secara andal pada biaya.

6.3.8 Beban yang ditangguhkan

Biaya dibayar di muka juga merupakan aset tidak berwujud. Perbedaan dari hal-hal yang tidak berwujud di atas adalah bahwa barang tidak berwujud berharga karena merupakan hak yang diharapkan dapat membantu menghasilkan keuntungan, dan biaya yang ditangguhkan menjadi berharga karena dibayar di muka untuk beberapa periode yang berbeda. Biaya ini dibayar dimuka dalam beberapa periode dan setiap periode diamortisasi. Biaya pendirian perusahaan termasuk dalam biaya dibayar di muka. Biaya yang ditangguhkan juga muncul di neraca, yang terpisah dari kategori aset tidak berwujud.

6.3.9 Biaya riset (penelitian) dan pengembangan

Riset/eksperimen sering dilakukan pada perusahaan besar untuk memperbaiki atau mengembangkan lebih lanjut proses manufaktur dan produknya. PSAK No. 19 menyatakan bahwa penelitian bersifat unik dan merupakan penelitian terencana yang dilakukan dengan harapan dapat menghasilkan pengetahuan baru dan pengetahuan teknis atau ilmiah. Beban penelitian diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Contoh kegiatan riset adalah :

1. kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru
2. pencarian, evaluasi, dan seleksi penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya.
3. Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem atau jasa.

4. Perumusan, desain, evaluasi dan seleksi berbagai alternatif kemungkinan bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem dan jasa.

Ini adalah studi untuk produksi atau pengembangan yang direncanakan dari bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau layanan baru atau yang ditingkatkan secara signifikan sebelum pengembangan, produksi, atau penggunaan dimulai, atau berarti hasil penelitian lain. Untuk mengetahui tentang. Jika kondisi terpenuhi, perusahaan dapat menggunakan biaya pengembangan sebagai aset tidak berwujud berikut :

- a. ada jaminan tentang kelayakan teknis penyelesaiannya
- b. biaya untuk menyelesaikan, menggunakan dan menjualnya dapat dihitung
- c. perusahaan memiliki kemampuan untuk menggunakan atau menjualnya
- d. menghasilkan manfaat ekonomis dimasa yang akan datang
- e. perusahaan memiliki kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait selama masa penggunaannya.

Menurut PSAK No. 19 biaya riset dan pengembangan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Namun apabila perusahaan mengalokasikanya maka harus dilakukan secara rasional dan konsisten.

6.3.10 Biaya pendirian perusahaan

Biaya yang terkait dengan memulai usaha, seperti izin, pajak, persediaan, biaya pencetakan seperti formulir, dikapitalisasi dalam akun biaya awal. (Weygant, 1995) Ada beberapa pendapat yang berhubungan dengan biaya pendirian sbb :

- a) Biaya pendirian akan menguntungkan selama perusahaan ada, sehingga biaya pendirian tidak diamortisasi dan akan muncul di neraca selama perusahaan ada.
- b) Biaya pendirian diamortisasi karena biaya pendirian tersebut tidak secara langsung memberikan manfaat bagi usaha perusahaan. Periode pengembalian tidak pasti, tetapi atas kebijaksanaan perusahaan. Tidak ada penyusutan

sebagian, tetapi disusutkan sekali dalam tahun pertama. Namun, jika nilai APB adalah 17, penyusutan tidak boleh melebihi 40 tahun.

6.4 Pengelompokan Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud dapat dikelompokkan menjadi:

- Umurnya dibatasi oleh undang-undang, peraturan, perjanjian, atau sifat aset itu sendiri.
- Yang tidak terbatas umurnya, misalnya: goodwill, merek dagang dan lain sebagainya.
- Kelebihan nilai investasi dalam saham perusahaan induk pada perusahaan anak diatas nilai kepentingannya pada kekayaan perusahaan anak.

Selain itu asset tidak berwujud dikelompokkan pula atas dasar sebagai berikut :

- Dapat tidaknya diidentifikasi secara khusus dengan hak, jenis aktifitas tertentu. Yang dapat diidentifikasi, seperti hak cipta, paten dll dan yang tidak diidentifikasi seperti goodwill
- Cara perolehan (1) yang diperoleh dengan pembelian seperti paten, hak cipta (2) Yang dikembangkan sendiri seperti formula rahasia (3) karena perusahaan seperti goodwill.
- Periode keuntungan yang diharapkan (1) terbatas kegunaannya seperti hak paten (2) tidak terbatas kegunaannya seperti goodwill.
- Dapat tidaknya dipisahkan dari eksistensi perusahaan (1) dapat dipisahkan seperti hak cipta (2) tidak dapat dipisahkan seperti goodwill.

6.5 Pencatatan dan Pelaporan Aset Tidak Berwujud

Pencatatan akuntansi untuk pembelian dan amortisasi asset tak berwujud secara sederhana adalah sebagai berikut:

Pembelian		Amortisasi	
(D)	Aset tak berwujud	(D)	Biaya amortisasi
(K)	kas	(K)	Aset tak berwujud

Aset tak berwujud disajikan pada kolom aktiva, dan dicatat sesuai dengan nilai bersih setelah dikurangi oleh akumulasi amortisasi. Jadi dapat dikatakan akuntansi asset tak berwujud adalah proses pencatatan, pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas harta tak berwujud atau tak terlihat memberikan manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Z. 2014. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE.
- Weygant, K. d. 1995. *Intermediate Accounting diterjemahkan Herman Wibowo*. Jakarta: Binarupa Aksara.

BAB 7

INVESTASI

Oleh Aprih Santoso

7.1 Pendahuluan

Investasi yaitu penempatan sejumlah dana saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang (Tendelilin, 2001). Pembedaan Investasi dibagi menjadi : 1) Investasi pada *financial assets* (Pasar uang (sertifikat deposito, *commercial papers*) dan Pasar modal (saham, obligasi, dan lain-lain). 2) Investasi pada *real assets* (Dilakukan dengan pembelian asset; produktif, pembangunan pabrik, dan pembelian mesin, dan lain-lain).

Tujuan utama manajemen adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham, caranya dengan memaksimalkan harga saham perusahaan. Pada akhirnya, memaksimalkan harga saham juga akan meningkatkan kesejahteraan sosial. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan (Rusdin, 2008).

Hak (istimewa) yang dimiliki investor saham, adalah : 1) Hak kepemilikan (*control of the firm*), hak ini tercemin dalam voting right yang dimiliki investor. Makin besar kepemilikan, makin besar hak pemegang saham untuk mengontrol perusahaan. 2) *Preemptive right*, hak investor saham untuk didahulukan dalam pembelian 'saham baru' yang diterbitkan oleh perusahaan, dengan tujuannya untuk melindungi hak kontrol investor dan untuk menghindari *dillution of value*.

Menurut Kieso *et al* (2011), setiap lembar saham memiliki hak istimewa sebagai berikut:

- a. Untuk membagi laba dan rugi secara proporsional.
- b. Untuk ikut serta dalam manajemen (hak untuk memilih direktur) secara proporsional.
- c. Untuk membagi aktiva perusahaan bila terjadi likuidasi secara proporsional.
- d. Untuk ikut serta secara proporsional dalam setiap penerbitan saham baru dari kelompok yang sama, disebut hak istimewa (*preemptive right*).

7.2 Investasi Dalam Sekuritas Hutang

Munawir (2016), hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang adalah kewajiban keuangan yang wajib dibayarkan kembali dalam rupa uang, barang, atau jasa pada saat waktu sudah jatuh tempo kepada pihak lain yang memberikan pinjaman (Hornrgren, 2012).

Sekuritas hutang (*debt securities*) adalah instrumen yang menunjukkan hubungan kreditor dengan suatu perusahaan. Yang termasuk sekuritas hutang meliputi: sekuritas pemerintah, sekuritas pemerintah daerah, obligasi perusahaan, hutang konvertibel, kertas komersial atau warkat niaga. Piutang dagang dan piutang pinjaman bukan merupakan sekuritas hutang karena tidak memenuhi definisi sekuritas. Menurut Kieso *et al.* (2011), bahwa piutang dagang adalah jumlah yang terhutang oleh pelanggan untuk barang dan jasa yang diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis normal.

Investasi dalam sekuritas hutang dikelompokkan menjadi tiga kategori terpisah untuk tujuan akuntansi dan pelaporan, yaitu:

1. Dimiliki Sampai Jatuh Tempo (*Held to Maturity*)

Perusahaan tidak boleh mengklasifikasikan ekuritas hutang sebagai sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo jika berniat untuk memiliki sekuritas tersebut selama periode waktu yang tidak terbatas. Perusahaan menghitung sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo sebesar biaya yang

diamortisasi, bukan pada nilai wajarnya. Jika manajemen berniat untuk memiliki sekuritas investasi tertentu sampai jatuh tempo dan tidak mempunyai rencana untuk menjualnya, maka nilai wajar (harga jual) tidaklah relevan untuk mengukur dan mengevaluasi arus kas yang berkaitan dengan sekuritas ini. Terakhir, karena sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo tidak disesuaikan ke nilai wajar, maka sekuritas ini tidak meningkatkan volatilitas laba yang dilaporkan atau modal yang dilaporkan seperti halnya sekuritas perdagangan dan sekuritas yang tersedia untuk dijual.

2. Perdagangan (*Trading*)

Sekuritas ini dilaporkan pada nilai wajar, dengan keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi (*unrealized holding gains and losses*) dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Keuntungan atau kerugian kepemilikan (*holding gain or loss*) adalah perubahan bersih dalam nilai wajar sekuritas dari satu periode ke periode lainnya, tidak termasuk pendapatan dividen atau bunga yang telah diakui tetapi belum diterima. Jika sekuritas sering diperdagangkan, FASB meyakini bahwa investasi tersebut harus dilaporkan pada nilai wajar di neraca. Disamping itu, perubahan dalam nilai wajar (keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan) harus dilaporkan didalam laporan laba rugi. Pelaporan seperti itu tentang sekuritas perdagangan akan memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemegang saham yang ada maupun calon pemegang saham.

3. Tersedia Untuk Dijual (*Available for Sale*)

Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang berkaitan dengan perubahan nilai wajar sekuritas hutang yang tersedia untuk dijual dicatat dalam akun keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Jadi, perusahaan melaporkan dalam neraca, sekuritas yang tersedia untuk dijual pada nilai wajar, tetapi tidak melaporkan perubahan nilai wajar sebagai bagian dari laba bersih sampai sekuritas itu dijual. Pendekatan ini mengurangi volatilitas laba bersih.

7.3 Investasi Dalam Sekuritas Ekuitas

Sekuritas ekuitas (*equity securities*) digambarkan sebagai sekuritas yang menunjukkan bagian kepemilikan seperti : saham biasa, saham preferen, atau modal saham lainnya. Sekuritas ekuitas juga mencakup hak untuk memperoleh atau melepaskan bagian kepemilikan dengan harga yang sudah disepakati atau yang dapat ditentukan. Pada saat sekuritas ekuitas dibeli, harga pokoknya mencakup harga beli sekuritas tersebut ditambah komisi pialang dan ongkos lainnya yang berkaitan dengan pembelian itu. Sampai dimana satu perusahaan (investor) memperoleh bagian atas saham biasa perusahaan lain (*investee*) biasanya menentukan perlakuan akuntansi untuk investasi tersebut sesudah akuisisi. Penerbitan sekuritas ekuitas menjadi pilihan terakhir dengan mendasarkan pada alasan bahwa para manajer tidak menginginkan terjadinya dilusi terhadap nilai saham bagi para pemegang saham lama (Viswanath, 1993).

Investasi oleh satu perusahaan dalam saham biasa perusahaan lain dapat diklasifikasikan menurut persentase saham dengan hak suara *investee* yang dimiliki investor:

1. Kepemilikan kurang dari 20% (metode nilai wajar), Investor mempunyai hak pasif.
2. Kepemilikan antara 20% dan 50% (metode ekuitas), Investor mempunyai pengaruh yang signifikan.
3. Kepemilikan lebih dari 50% (laporan konsolidasi), Investor mempunyai hak mengendalikan.

Myers & Majluf (1984), menyatakan bahwa probabilitas penerbitan ekuitas meningkat bila ada kenaikan nilai saham perusahaan yang dipertahankan oleh pemegang saham. Perusahaan akan memilih waktu yang tepat untuk menerbitkan sekuritas pada periode waktu tertentu, ketika terjadi penurunan tingkat informasi yang asimetrik (Choe, *et al.*, 1989 in Harris & Raviv, 1991).

7.4 Penyajian

1. Penyajian Investasi Dalam Laporan Keuangan

Untuk sekuritas yang diklasifikasikan sebagai tersedia-untuk-dijual dan secara terpisah untuk sekuritas digolongkan sebagai dimiliki-hingga-jatuh-tempo, perusahaan harus menjelaskan:

- a) Nilai wajar agregat, keuntungan kepemilikan bruto yang belum direalisasi, kerugian bruto yang belum direalisasi, dan basis biaya yang diamortisasi oleh jenis sekuritas utama (hutang dan sekuritas). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011), PSAK 13 setelah IFRS, Nilai wajar adalah nilai pada tanggal tertentu.
- b) Informasi mengenai jatuh tempo kontraktual sekuritas hutang. Perusahaan dapat mengelompokkan informasi jatuh tempo, misalnya : (a) dalam satu tahun, (b) setelah satu tahun hingga lima tahun, (c) setelah lima tahun hingga sepuluh tahun, dan (d) setelah sepuluh tahun.

2. Penurunan Nilai

Setiap investasi harus dievaluasi setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah investasi itu mengalami penurunan nilai (*impairment*) yang bersifat tidak temporer. Jika penurunan itu dianggap tidak temporer, maka dasar biaya dari setiap sekuritas diturunkan sampai ke dasar biaya yang baru. Jumlah penurunan itu diperhitungkan sebagai kerugian yang direalisasi, dan karenanya dimasukkan dalam laba bersih. Untuk sekuritas hutang, pengujian penurunan nilai ditujukan untuk menentukan apakah “kemungkinan besar bahwa investor tidak akan bisa menagih seluruh jumlah yang terhutang menurut persyaratan kontraktual.”

Untuk sekuritas ekuitas, pedomannya tidak seperti itu. Setiap kali nilai yang dapat direalisasi jumlahnya lebih rendah daripada jumlah tercatat investasi, maka harus dipertimbangkan bahwa telah terjadi penurunan nilai. Faktor-faktor yang terlibat adalah berapa lama dan sejauhmana nilai wajar berada dibawah biaya, kondisi keuangan dan prospek jangka pendek emitennya, serta niat

dan kemampuan perusahaan investor untuk mempertahankan investasinya agar memungkinkan ia untuk melakukan pemulihan nilai wajar yang telah diantisipasi.

3. Transfer Di Antara Kategori

Transfer diantara setiap kategori diperhitungkan sebesar nilai wajar. Jadi, jika sekuritas yang tersedia untuk dijual ditransfer ke investasi yang dimiliki sampai jatuh tempo, maka investasi baru ini (yang dimiliki sampai jatuh tempo) dicatat pada tanggal transfer sebesar nilai wajar kategori yang baru. Demikian pula jika investasi yang dimiliki sampai jatuh tempo ditransfer menjadi investasi yang tersedia untuk dijual, maka investasi yang baru (yang tersedia untuk dijual) dicatat pada nilai wajarnya. Aturan nilai wajar ini memastikan bahwa perusahaan tidak mungkin menghindari pengakuan nilai wajar hanya dengan mentransfer sekuritas ke kategori dimiliki sampai jatuh tempo.

DAFTAR PUSTAKA

- Harris, M. & Raviv, A. 1991. The Theory of Capital Structure. *Journal of Finance*, 46, 297-355
- Horngren, C.T. 2012. *Akuntansi Biaya*: Jilid 1, Edisi ke 12 Jakarta: Erlangga
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Jakarta : IAI
- Kieso, D.E., Weygandt, J.J. & Warfield, T.D. 2011. *Intermediate Accounting IFRS* Edition Volume Pertama. United States of America: John Wiley & Sons
- Munawir, S. 2016. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta : Liberty
- Myers, S. & Majluf, N. 1984. Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information Investors Do Not Have. *Journal of Financial Economics*, 13, 187- 221
- Rusdin. 2008. *Pasar Modal: Teori, Masalah, dan Kebijakan dalam Praktik*. Bandung: Alfabeta
- Tendelilin, E. 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I. Yogyakarta : BPFE
- Viswanath, P.V. 1993. Strategic Consederation, the Pecking Order Hypotheses and Market Reaction to Equity Financing. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 28. 213- 234

BAB 8

PENGAKUAN PENDAPATAN

Oleh Richad Alamsyah

8.1 Pendahuluan

Dalam pengukuran kinerja keuangan indikator pendapatan merupakan indikator penting yang sangat di sorot oleh pengguna laporan keuangan. Gambaran kinerja masa lalu dan masa depan perusahaan khusus nya pada pendapatan akan terlihat sebagai ukuran kinerja yang tercermin seperti, laba bersih, laba per saham dan EBITDA. Maka dari itu, menetapkan sebuah pedoman yang sesuai untuk perlakuan terhadap pengakuan pendapatan adalah suatu hal yang perlu diprioritaskan.

Dalam pola pelaporan dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan disebutkan bahwa pendapatan (*revenues*) adalah salah satu unsur yang membentuk suatu penghasilan selain gain atau keuntungan. Dalam mengimplementasikan aktivitas perusahaan yang menyebabkan pendapatan yang dikenal dengan sebutan yang beragam seperti penghasilan jasa, penjualan, bunga, sewa, dividen dan royalti. Pengakuan pendapatan memunculkan risiko kecurangan (*fraud*) yang sangat tinggi. Meskipun aturan terkait aturan akuntansi yang telah diikuti, tetapi risiko atau kesalahan dan ketidakakuratan dalam penerapan pelaporan pendapatan sangat signifikan.

Yang digunakan sebagai acuan dalam tujuan kerangka dasar pendapatan untuk :

- a) persiapan penyusunan jurnal pengakuan pendapatan;
- b) kriteria dalam memahami pengakuan pendapatan dalam penjualan barang;
- c) kriteria dalam memahami pengakuan pendapatan jasa;
- d) menjelaskan ruang lingkup terkait aturan dalam PSAK yang mengatur pendapatan dari pemanfaatan aset perusahaan
- e) pemahaman kasus-kasus pengakuan pendapatan yang lebih jelas dan spesifik

8.2 Definisi Pendapatan

Pendapatan adalah salah satu indikator sangat penting dari penyusunan dalam pelaporan laba rugi (*income Statment*) dalam suatu entitas. Dalam hal pendapatan mungkin diatara kita masih banyak yang masih bingung terkait pendapatan antara kata *revenue* dan *income*. Namun, dalam hal ini sebenarnya jika diartikan pendapatan sebagai *income* dan dapat diartikan sebagai *revenue*, oleh karena itu, kata *revenue* didefinisikan sebagai pendapatan atau penghasilan maupun keuntungan dan kata *income* diartikan sebagai pendapatan atau penghasilan.

kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan pendapatan sebagai hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan Kamus manajemen mendefinisikan pendapatan sebagai uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah , gaji, laba, bunga, komisi, ongkos dan sewa.

Pendapatan dapat disimpulkan sebagai dana masuk dari nilai lebih ekonomi yang diakibatkan dari kegiatan operasional entitas selama satu periode jika dana masuk tersebut mengakibatkan perubahan atas bertambahnya modal yang tidak bersumber dari peranan pemegang saham.

Jika dilihat dari prespektif pajak aliran dana masuk yang ditagihkan untuk kepentingan pihak ketiga atas transaksi yang memunculkan aspek perpajakan. Maka pendapatan bukan keuntungan ekonomi yang mengarah ke entitas dan tidak berdampak pada bertambahnya ekuitas, maka kedua indikator tersebut tidak bisa diakui sebagai pendapatan.

8.3 Ruang Lingkup Pendapatan Berdasarkan Standar Akuntansi

Pendapatan dinilai dengan nilai wajar, imbalan yang diterima atau dapat diterima dikurang potongan harga atau rabat. Jika pendapatan ditunda dalam penerimaannya, maka nilai wajar ditetapkan berdasarkan diskonto dana kas & bank yang akan dimiliki pada tingkat suku bunga implisit. Dari hal tersebut terdapat pendapatan bunga yang mana berasal pada ketidaksamaan nilai pokok dengan nilai wajar terhadap barang dan jasa yang dijual.

Pengakuan pendapatan diatur dalam PSAK 23 : Pendapatan, yang ruang lingkupnya mencakup:

1) Pendapatan atas penjualan barang

Barang termasuk barang yang dihasilkan dari proses produksi suatu entitas untuk dijual dan dibeli lalu kemudian dijual kembali, semisal barang dagangan yang dibeli pengecer atau properti dan tanah yang dimiliki lalu di jual kembali.

2) Pendapatan atas penjualan jasa

Penjualan atas jasa pada umumnya terkait dengan kinerja suatu entitas atas apa yang telah di sepakati secara kontraktual serta dilaksanakan dalam suatu periode waktu. Jasa tersebut biasanya dapat di serahkan dalam satu periode atau lebih dari satu periode.

3) Pendapatan atas penggunaan aset

Penggunaan aset dapat menghasilkan satu pendapatan semisal pemakaian asset oleh pihak ketiga yang menimbulkan royalty, deviden dan bunga.

Pendapatan yang dikecualikan dalam PSAK 23 antara lain :

- a) Pendapatan atas Sewa (diatur di PSAK 30) ;
- b) Pendapatan atas Dividen dari investasi dengan metode ekuitas (diatur di PSAK 15);
- c) Pendapatan atas kontrak asuransi (diatur di PSAK 28, PSAK 36, dan PSAK 62) ;
- d) Pendapatan atas perubahan nilai wajar instrumen keuangan (diatur di PSAK 50 dan PSAK 55) ;
- e) Pendapatan atas Kontrak Konstruksi (diatur di PSAK 34);
- f) Pendapatan atas perubahan nilai aset lancar lain;
- g) Pendapatan atas ekstraksi hasil tambang;
- h) Penilaian awal dan perubahan nilai aset biologi dan produk agrikultur (diatur di PSAK 69).

8.4 Pendapatan atas Penjualan Barang

Pengklasifikasian kriteria dalam pengakuan pendapatan atas penjualan barang antara lain :

- a) Pengukuran jumlah pendapatan dilakukan dengan andal.

- b) Manfaat ekonomi kemungkinan besar berhubungan atas transaksi tersebut yang diterima oleh entitas;
- c) Pemindahan risiko oleh entitas dan kegunaan kepemilikan barang secara besar kepada pelanggan;
- d) Pengelolaan tidak lagi dilanjutkan oleh entitas berhubungan dengan kepemilikan atas barang ataupun pelaksanaan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- e) Biaya yang dihasilkan atas terjadinya transaksi penjualan dapat dinilai secara benar.

Pada dasarnya pengklasifikasian kriteria pengakuan pendapatan atas penjualan barang tersebut tidak terlalu jelas kapan terjadinya pemindahan risiko dan manfaat yang signifikan dari penjual kepada pelanggan. Pada prinsipnya, manfaat dan pemindahan risiko kepemilikan terjadi secara bersamaan dengan peralihan hak kuasa atau kepemilikan atas barang kepada pelanggan. Hal tersebut terjadi yang umumnya pada penjualan eceran. Dalam kasus lain, pemindahan risiko dan manfaat kepemilikan terjadi pada saat yang berbeda dengan pemindahan hak kuasa atau kepemilikan atas barang tersebut. pendapatan atas penjualan tidak dicatat, jika entitas tersebut menahan risiko tinggi dari kepemilikan atas transaksi tersebut. Arti dalam menahan risiko signifikan dapat diilustrasikan dengan situasi sebagai berikut:

- a) Jika penerimaan atas pendapatan yang didapatkan dari hasil pendapatan atas pembelian dan penjualan barang yang bersangkutan.
- b) Suatu entitas menunda kewajiban dikarenakan kinerja yang tidak cukup memuaskan maka tidak dijamin oleh ketentuan jaminan;
- c) Pelanggan berwenang dalam pembatalan pembelian berlandaskan argumentasi sesuai ketentuan dalam perjanjian entitas; dan
- d) Jika dalam pengiriman barang ditetapkan dengan instalasinya, serta perakitan tersebut merupakan komponen signifikan dari perjanjian (kontrak) yang masih berjalan pada entitas.

Jika penahanan risiko yang dilakukan oleh entitas rendah atas kepemilikan, atas transaksi dapat dicatat sebagai pendapatan dan penjualan.

Studi kasus I

Suatu entitas EZ melakukan penjualan barang elektronik kepada pelanggannya. Dalam transaksi tersebut di jelaskan bahwa harga jual barang elektronik meliputi kewajiban entitas EZ untuk :

- a) Instalasi barang elektronik (pelanggan tidak bisa merakit sendiri).
- b) Pengiriman barang ke lokasi pembeli ;
- c) Menyambungkan ke panel listrik (dapat dilakukan sendiri oleh pembeli).

Pada langkah mana yang dikatakan sebagai risiko dan manfaat signifikan berpindah?

Penyelesaian:

Ketika pengiriman barang elektronik ke lokasi pembeli dan proses instalasi barang elektronik telah dilakukan, maka risiko dan manfaat signifikan telah berpindah. Pemasangan ke panel listrik bukan merupakan risiko signifikan.

8.5 Pendapatan atas Penjualan Jasa

Informasi Penjualan jasa diklaim sebagai pendapatan sebagai acuan tingkat terselesaikannya suatu transaksi pada periode akhir pelaporan jika hasil atas penjualan jasa dapat diukur secara andal. Pengukuran dilakukan secara benar jika memiliki unsur sebagai berikut :

- a) Pengukuran jumlah pendapatan dilakukan dengan benar.
- b) Manfaat ekonomi besar kemungkinan yang berhubungan atas transaksi diterima oleh entitas;
- c) Pemindahan risiko oleh entitas dan kepemilikan manfaat produk barang secara signifikan kepada pelanggan;
- d) Biaya yang dihasilkan atas terjadinya transaksi penjualan dapat dihitung secara benar.

Jika suatu transaksi suatu transaksi dalam perhitungannya tidak benar maka pengakuan pendapatan hanya mencatat beban yang sudah diakui sebelumnya.

Metode pengukuran dalam estimasi tingkat penyelesaian terdiri atas :

- a) Bobot beban yang muncul sampai tanggal tertentu dibagi perkiraan pada saat ini seluruh beban hingga pekerjaan selesai
- b) Survei hasil pekerjaan yang telah dilakukan
- c) Prosentase dari total jasa yang dilaksanakan serta dicatat sebagai jasa yang akan dilakukan pada periode tertentu.

Studi Kasus 2

Suatu Entitas CA mendapatkan jasa berupa pengembangan sistem IT kepada entitas EZ. Pengembangan sistem IT mendapatkan nilai kontrak sebesar Rp.300 juta. Perkiraan biaya pekerjaan saat ini sebesar Rp.120 juta. Biaya yang muncul sampai akhir periode pelaporan pertama sebesar Rp.35 juta dengan menggunakan prosentase pekerjaan hingga akhir periode pelaporan pertama, ditaksir pekerjaan tersebut telah selesai 30% dari target yang direncanakan.

Dari studi kasus tersebut berapakah pendapatan yang dapat diakui pada akhir periode pencatatan akuntansi awal?

Penyelesaian:

Perlakuan pendapatan atas studi kasus diatas, pendapatan yang dapat diakui adalah sebesar 30% dari nilai kontrak sebesar Rp.300 juta yaitu Rp.90 Juta serta biaya yang dapat dibebankan sebesar Rp.35. juta.

8.6 Pendapatan atas Penggunaan Aset Oleh Pihak Ketiga

Pendapatan yang muncul dari penggunaan aset suatu entitas oleh pihak ketiga mengakibatkan pendapatan royalti, bunga dan dividen diakui, jika :

- a) Manfaat ekonomi besar kemungkinan yang berhubungan atas transaksi yang diterima oleh entitas.
- b) Pengukuran jumlah pendapatan dilakukan dengan andal.

Prinsip dalam pengakuan pendapatan atas royalti, bunga dan dividen antara lain :

- a) Pengakuan pendapatan royalti atas berdasarkan akrual yang disesuaikan dengan isi dari kontrak yang benar
- b) Pengakuan pendapatan atas bunga diakui berlandaskan metode suku bunga efektif
- c) Pengakuan pendapatan dividen dicatat atas hak kepemilikan saham untuk penerimaan pembayaran yang telah ditentukan.

8.7 Pendapatan atas Kepemilikan Kontrak Jangka Panjang

Penyediaan jasa atas kontrak terkadang membutuhkan waktu yang panjang dalam penyelesaian hingga melebihi satu atau lebih periode akuntansi. Penerapan dalam pengakuan pendapatan harus disesuaikan dengan masa pelaksanaan kontrak jangka panjang jika kriteria pengakuan pendapatan atas jasa terpenuhi. Metode ini dapat dikatakan Metode Prosentase Penyelesaian (*Percentage of Completion Method*). Namun jika kriteria pengakuan pendapatan atas jasa tidak terpenuhi, maka digunakan metode pengakuan pendapatan yang lain, yang mana pengakuan pendapatan dicatat berdasarkan besaran biaya yang terealisasi (*Cost Recovery/Zero Profit Method*).

1) Metode Prosentase Penyelesaian

Jika dengan menggunakan metode ini maka :

- a) Pendapatan nilai kontrak dicatat atas pendapatan di *income statement* (laba-rugi) selama pembukuan akuntansi dimana pekerjaan dilaksanakan.
- b) Biaya nilai kontrak pada umumnya dicatat sebagai beban dalam *income statement* (laba rugi) pada periode akuntansi dimana pekerjaan terakait dilakukan.
- c) Prosentase biaya perjanjian (kontrak) yang terealisasi untuk pekerjaan yang dikerjakan hingga perhitungan dibagi dengan estimasi seluruh biaya perjanjian (Kontrak). Beberapa rumus perhitungan sering kali digunakan dalam metode ini antara lain :

$$\text{Prosentase Penyelesaian} = \frac{\text{Realisasi biaya hingga saat ini}}{\text{Estimasi terkini seluruh biaya perjanjian}}$$

- d) Penyelesaian suatu bagian secara fisik dari pekerjaan perjanjian ; dan
- e) pengecekan atas pekerjaan yang selesai dilaksanakan.

Studi Kasus 3 :

WK Kontraktor mempunyai kontrak untuk mendirikan suatu bangunan gedung senilai Rp.5 Milyar dengan perkiraan biaya hingga selesai sebesar Rp.4 Milyar Kontrak mulai dibangun di bulan juli 2018, serta jembatan penghubung estimasi terselesaikan pada bulan oktober 2020. Data tersebut berhubungan dalam periode konstruksi.

(Dalam Jutaan Rupiah)	2018	2019	2020
Biaya yang terjadi hingga saat ini	1.000	2.950	4.050
perkiraan biaya finishing	3.000	1.100	0
Tagihan pekerjaan kepada pemberi kerja dalam tahun berjalan	900	2.400	1.700
Kas & Bank yang diperoleh dalam tahun berjalan	750	1.750	2.500

Kalkulasikanlah serta buatlah ayat jurnal yang dibutuhkan untuk tahun 2018 – 2020 !

Penyelesaian :

Metode perhitungan prosentase penyelesaian :

	2018	2019	2020
Nilai Perjanjian	5.000	5.000	5.000
Dikurangi perkiraan Biaya :			
Biaya sampai dengan saat ini	1.000	2.950	4.050
perkiraan biaya penyelesaian	3.000	1.100	0
perkiraan total biaya	4.000	4.050	4.050
Perkiraan Laba Kotor	1.000	2.050	950
Prosentase penyelesaian	25%	73%	100%

Melakukan pencatatan beban, tagihan dan pendapatan atas tagihan dalam Ayat jurnal sebagai berikut :

No	Account	2018		2019		2020	
		Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
1	Konstruksi on Proses	1.000		1.950		1.100	
	Bahan Baku, Kas & Bank, Hutang atas usaha		1.000		1.950		1.100
2	Piutang atas Usaha	900		2.400		1.700	
	Tagihan Kontruksi on Proses		900		2.400		1.700
3	Kas & Bank	750		1.750		2.500	
	Piutang atas Usaha		750		1.750		2.500

Kalkulasi Laba kotor per tahun

	Dicatat saat ini	Dicatat tahun sebelumnya	Dicatat ditahun berjalan
2018			
Pendapatan	1.250	-	1.250
Beban	(1.000)	-	(1.000)
Laba Kotor	250	-	250
2019			
Pendapatan	3.642	1.250	2.392
Beban	(2.950)	(1.000)	(1.950)
Laba Kotor	692	250	442
2020			
Pendapatan	5.000	3.642	1.358
Beban	(4.050)	(2.950)	(1.100)
Laba Kotor	950	692	258

Pencatatan Laba Bruto per tahun dalam ayat jurnal :

No	Account	2018		2019		2020	
		Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
1	Konstruksi on Proses	250		442		258	
	Biaya Kontruksi	1.000		1.950		1.100	
	Penghasilan Jasa Konstruksi		1.250		2.392		1.358
2	Konstruksi on Proses					5.000	
	Tagihan Kontruksi on Proses						5.000

8.8 Pengakuan Pendapatan Yang Spesifik

Dalam hal kasus-kasus pengakuan pendapatan yang spesifik pada suatu entitas antara lain :

- 1) *Bill and Hold Sales* (ketika penjualan mengalami penundaan)
Permintaan penundaan oleh keinginan pembeli, meskipun semua persyaratan atas penjualan sudah terpenuhi, entitas dapat mencatat pendapatan atas penjualan tersebut sebagai pendapatan jika :
 - a) Besar kemungkinan pengiriman barang akan dilakukan;
 - b) Suatu barang yang berada ditangan penjual, teridentifikasi sedia untuk dikirim kepada pelanggan ketika pengakuan pendapatan atas penjualan ;
 - c) Penundaan pengiriman yang secara khusus diakui oleh pelanggan;
 - d) Persyaratan yang umumnya pada berlakunya pembayaran.
- 2) *Sales with buy back agreement* (Penjualan dengan opsi pembelian kembali sesuai kesepakatan)
Penjual secara beriringan setuju melakukan pembelian kembali barang yang sama pada periode tertentu, ketika penjual mempunyai opsi beli (*call option*) untuk melakukan pembelian kembali, atau pelanggan memiliki opsi jual (*put option*) dengan syarat pembelian kembali oleh pelanggan atas transaksi tersebut.
- 3) *Sales with right of return* (Penjualan dengan hak untuk pengembalian)
Penjualan yang mana penjual memberikan tenggat waktu dengan periode tertentu kepada pelanggan untuk melakukan retur atas barang jika pelanggan tidak puas dengan kualitas barang yang telah dibeli.
- 4) *Lay away sales*
Pengiriman barang dilaksanakan pada saat pelanggan melakukan pembayaran terakhir dalam masa cicilan. Namun, jika pengalaman menunjukkan track record yang baik dalam transaksi penjualan tersebut dilaksanakan, maka pendapatan dapat diakui ketika pelanggan membayarkan uang tanggungan

yang signifikan diterima sepanjang barang berada di tangan pelanggan, dapat terlacak dan siap untuk dikirim ke pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA

- KBBI, 2022. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Availabe at : <https://kbbi.web.id/dapat> [Diakses 30 Juni 2022].
- Kieso, Weygant, Warfield. 2017. Intermediate Accounting – IFRS Edition 3rd. ISBN : 978-1119372936.
- Standar Akuntansi Keuangan no. 23, 34 dan ISAK 10. Ikatan Akuntan Indonesia. 2022

BIODATA PENULIS



Renika Hasibuan, S.E.,M.Si

Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS) Universitas
Sari Mutiara Indonesia

Renika Hasibuan, S.E.,M.Si adalah Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS) Universitas Sari Mutiara Indonesia, dan menjabat sebagai Ketua Program Studi Akuntansi. Lahir dari Desa Lumbanrau, 29 Agustus 1985. Mengampu mata kuliah Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Praktikum Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Perpajakan. Aktif di berbagai penelitian dan pengabdian masyarakat. Selain aktif menjadi dosen, Alumni S-1 Akuntansi Universitas Darma Agung (lulus 2009) dan S-2 di Universitas Sumatera Utara (lulus 2013) ini juga menjadi konsultan accounting di STTBM sampai sekarang, sebelumnya Ibu dari dua anak ini juga pernah berkarir sebagai Auditor di Kreston Internasional, dan merintis bisnis jual beli perabot dengan nama Tania Perabot.

E-mail : renikahasibuan2016@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Erna Hendrawati

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Penulis sejak tahun 2005 menjadi seorang dosen Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Sertifikasi Pendidik sejak tahun 2013 dengan jabatan Akademik Lektor. Sebagai pengajar aktif, tidak hanya melakukan pengajaran, namun juga melakukan penelitian serta pengabdian pada masyarakat. Beberapa buku yang diterbitkan baik sendiri maupun kolaborasi diantaranya : Analisa Laporan Keuangan, Pengelolaan dan Alokasi Dana Desa, Partisipasi Penganggaran dan Pancasila, Ekonomi Syariah, Ekonomi Bisnis Indonesia. Bentuk pengabdian pada masyarakat yang beliau laksanakan adalah dengan melakukan penyuluhan di beberapa desa di Jawa Timur dengan topik terkait ekonomi dan akuntansi. Melakukan penelitian tiap tahun baik dari pendanaan internal maupun eksternal.

BIODATA PENULIS



Amelia Rizky Alamanda, S.E., M.M.

Dosen tetap di Universitas Padjadjaran Program Studi Akuntansi

Penulis lahir di Denpasar pada tanggal 14 Mei 1990. Penulis merupakan dosen tetap di Universitas Padjadjaran Program Studi Akuntansi. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Akuntansi Universitas Padjadjaran.

BIODATA PENULIS



Rosanna Purba, S.E., M.Si

Dosen tetap di Universitas Sari Mutiara Indonesia pada Program Studi Akuntansi

Penulis lahir di Simalungun, Sumut pada tanggal 13 April 1982. Penulis merupakan dosen tetap di Universitas Sari Mutiara Indonesia pada Program Studi Akuntansi. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S2 pada Magister Akuntansi STIE YKPN Yogyakarta.

BIODATA PENULIS



Aries Veronica

Dosen tetap PNSD pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi,
Universitas Tamansiswa Palembang

Penulis lahir di Palembang tanggal 18 April. Penulis adalah dosen tetap PNSD pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Tamansiswa Palembang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Sriwijaya (2002) dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Ekonomi BKU Akuntansi di Universitas Sriwijaya (2008). Penulis menekuni bidang Akuntansi sejak tahun 2005 dan pernah menjabat Ketua Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi di Universitas Tamansiswa Palembang. Matakuliah yang diampu saat ini adalah Pengantar Akuntansi, Teori Akuntansi, dan Seminar Akuntansi. Pengalaman Mengajar : Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas IBA, Universitas Katolik Musi Charitas, STIE MDP, dan STIA Annisa Al Farizi.

BIODATA PENULIS



Zainab, S.E.,M.S.A.

Dosen tetap di STIE NU Trate Gresik Program Studi Akuntansi

Penulis lahir di Gresik pada tanggal 30 Juli 1991. Penulis merupakan dosen tetap di STIE NU Trate Gresik Program Studi Akuntansi. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Akuntansi STIESIA Surabaya.

BIODATA PENULIS



Aprih Santoso

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang (USM)

Aprih Santoso., Lahir di Semarang, menghabiskan masa studi SD, SMP dan SMEA di Semarang, mulai tahun 1970 s/d 1983. Melanjutkan Pendidikan di Fakultas Ekonomi (S1) dan Magister Manajemen UNSOED Purwokerto (S2). Saat ini aktif sebagai dosen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang (USM). Selain itu, juga aktif menulis artikel di jurnal nasional dan internasional, serta aktif sebagai reviewer jurnal bersinta maupun jurnal belum bersinta baik di jurnal Penelitian maupun di jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

Email: aprihsantoso@usm.ac.id dan Hp. 08132577397

BIODATA PENULIS



Richad Alamsyah SE.,M.Ak.,CSA®.,CRMO®.,CFP®

Dosen tetap di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor Program Studi Akuntansi

Penulis lahir di Bogor pada tanggal 03 Desember 1991. Penulis merupakan dosen tetap di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor Program Studi Akuntansi. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Akuntansi Universitas Pancasila. Penulis juga telah menyelesaikan beberapa sertifikasi profesi antara lain: sertifikasi profesi pasar modal, manajemen risiko dan perencana keuangan